



**FAKTOR DETERMINAN
KETIDAKTERLAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN
KELOMPOK DI SMK Se-KOTA PEKALONGAN
TAHUN AJARAN 2012/2013**

Skripsi

disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Strata 1
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

oleh
Sakinah Faizah
1301408037

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang tanggal, 20 Februari 2013.

Panitia

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Haryono, M. Psi.
NIP. 19620222 198601 1 001

Dr. Awalya, M.Pd., Kons
NIP. 19601101 1987102 2 001

Penguji Utama

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons
NIP. 19521120 197703 1 002

Penguji/Pembimbing I

Penguji/Pembimbing II

Drs. Suharso, M. Pd., Kons.
NIP. 19620220 198710 1 001

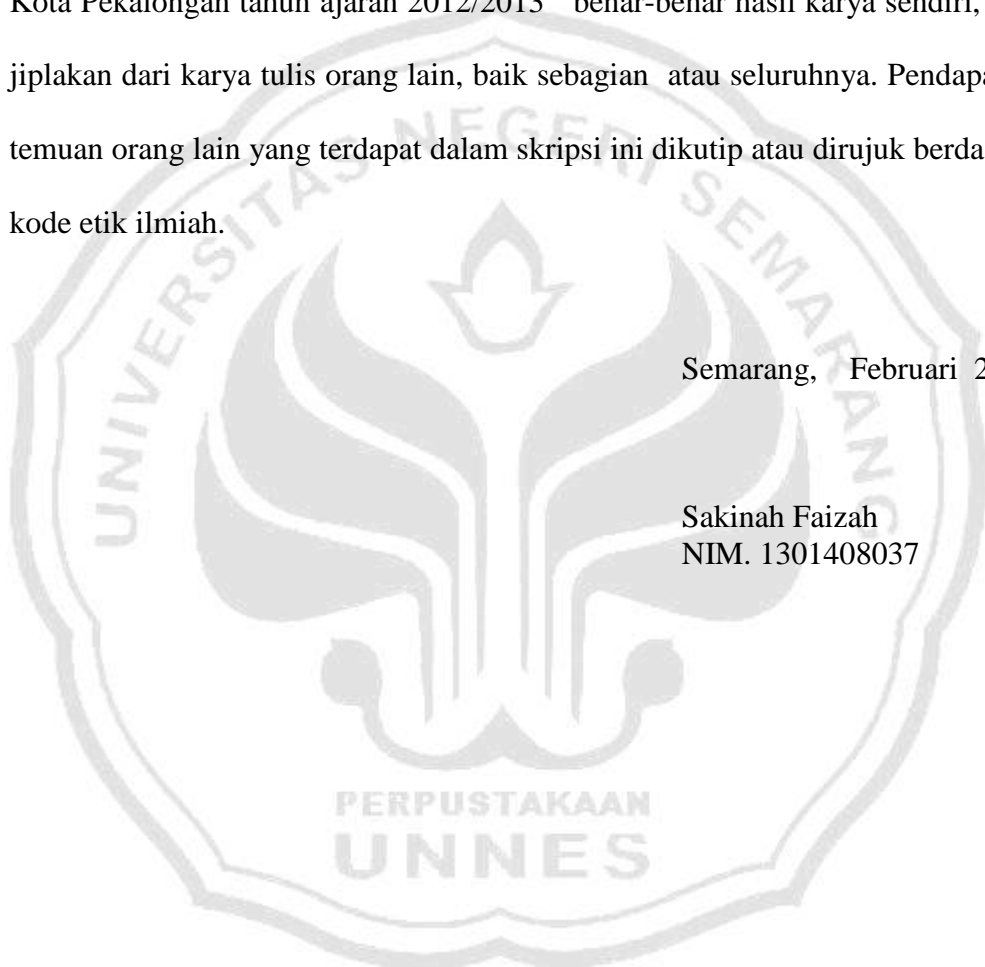
Drs. Eko Nusantoro, M.Pd
NIP. 19600205 199802 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul "Faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013" benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

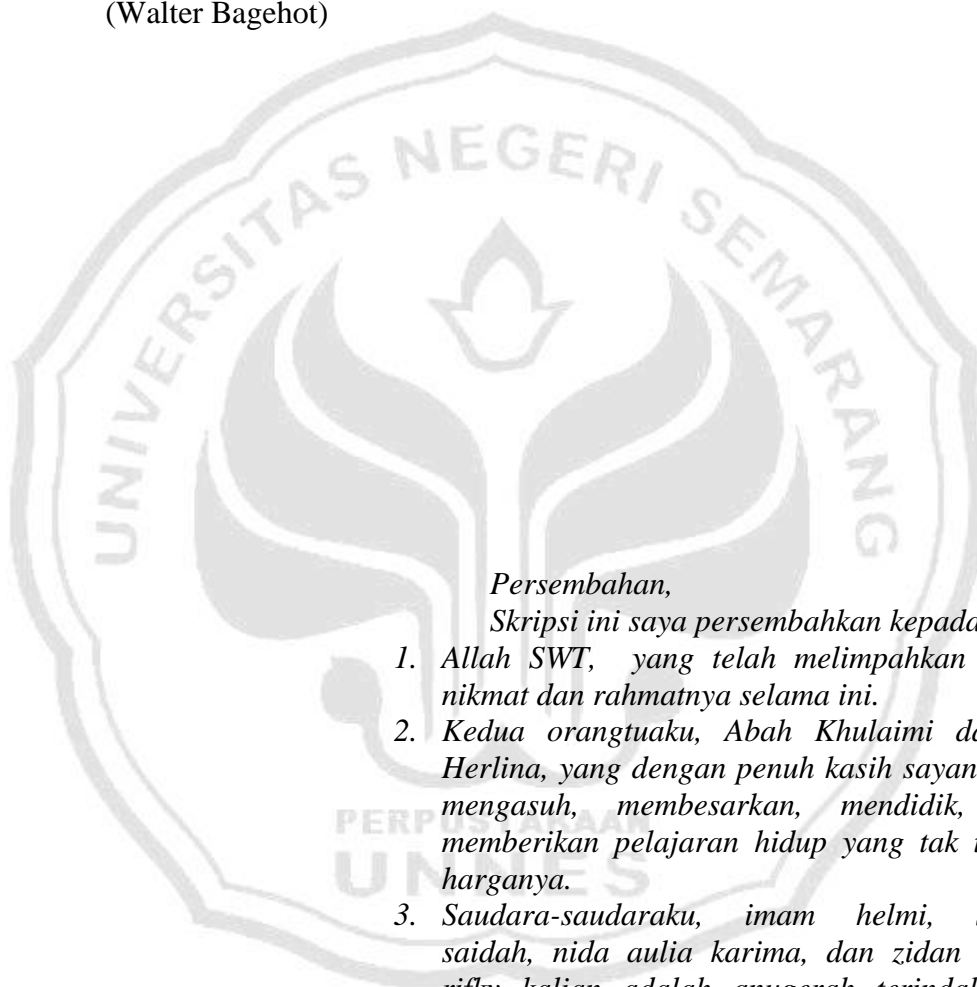
Sakinah Faizah
NIM. 1301408037



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Inshirah : 5-6)
2. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do (Walter Bagehot)



Persembahan,

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya selama ini.
2. Kedua orangtuaku, Abah Khulaimi dan Ibu Herlina, yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya.
3. Saudara-saudaraku, imam helmi, salmah saidah, nida aulia karima, dan zidan hilman rifky kalian adalah anugerah terindah yang selalu ada dari dulu hingga sekarang.
4. Achlis nfd, yang selalu sabar dan memberi dukungan untukku.
5. Teman-teman mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2008.
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah swt. atas nikmat iman, Islam, rahmat, dan hidayah yang dilimpahkan-Nya tiada henti kepada penulis. Atas izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2012/2013". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan dari ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah.

Penyusunan skripsi berdasarkan atas penelitian survey yang dilakukan dalam suatu prosedur terstruktur dan terencana. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak banyak kendala, meskipun diakui penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan berkat rahmat Allah SWT dan ketekunan, dapat terselesaikan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- 2) Drs. Hardjono, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian, untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Drs. Eko Nusantoro M.Pd. , Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang yang telah memperlancar dan memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.

- 4) Prof Dr Mungin Eddy Wibowo M.Pd Kons Dosen Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 5) Drs. Suharso, M.Pd.,Kons., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 6) Drs. Eko Nusantoro M.Pd. , Dosen Pembimbing II yang telah memperlancar dan memberikan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 7) Bapak dan Ibu dosen jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
- 8) Kepala Sekolah SMK Se-Kota Pekalongan, yang telah memberikan ijin dan memfasilitasi selama melaksanakan penelitian.
- 9) Konselor SMK Se-Kota Pekalongan, yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
- 10) Sahabat-sahabatku, Putri, Ana, Tyas, Karina, carti, Rindy, Bregita, Tutut, Mifta, Whitney, Achlis, Agus, Danang, Bayu,yang selalu ada menjadi penyemangat dan tempat berdiskusi.
- 11) Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Februari 2013
Penulis

ABSTRAK

Faizah, Sakinah. 2013. *Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2012/2013*. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs.Suharso,M.Pd.,Kons dan Pembimbing II : Drs.Eko Nusantoro, M.Pd.

Kata Kunci : Faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok

Layanan bimbingan dan konseling dengan format kelompok menjadi primadona dalam interaksi antara konselor dengan siswa, mengingat tidak semua kebutuhan siswa dapat di berikan secara format klasikal ataupun individual. Kenyataan yang dijumpai dilapangan layanan bimbingan kelompok saat ini cenderung tidak dilaksanakan oleh konselor karena beberapa faktor baik dari faktor dalam diri konselor ataupun faktor dari luar diri konselor yang berpengaruh langsung dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Sesuai dengan keadaan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai faktor yang menjadi determinan dari ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah faktor apakah yang menjadi determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif survey. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh konselor SMK di Kota Pekalongan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok sejumlah 79 item dan telah diujicobakan untuk digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis faktor dan deskriptif prosentase.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum masing-masing komponen memperoleh nilai koefisien korelasi yang bervariasi. Dari faktor internal, hasil yang diperoleh adalah kompetensi kepribadian memperoleh nilai (0,759), kompetensi sosial (0,783), kompetensi profesional (0,816), seluruh komponen dalam faktor internal memperoleh hasil dengan kategori cukup tinggi. Kemudian untuk faktor eksternal hasilnya adalah sebagai berikut : beban tugas konselor (0,769), kepala sekolah (0,760), guru mata pelajaran (0,589), wali kelas (0,612), dan sarana prasarana (0,742).

Simpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah faktor internal, sedangkan untuk faktor internal komponen yang menjadi determinan adalah kompetensi profesional, untuk faktor eksternal komponen yang menjadi determinan adalah beban tugas konselor. Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk konselor agar meningkatkan penguasaan kompetensi konselor, sedangkan untuk kepala sekolah diharapkan agar memberikan kebijakan yang menunjang pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Skripsi.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Layanan Bimbingan Kelompok	14
2.2.1 Pengertian Bimbingan Kelompok.....	14
2.2.2 Tujuan Bimbingan Kelompok.....	15
2.2.3 Fungsi Bimbingan Kelompok	17
2.2.4 Jenis Bimbingan Kelompok	17
2.2.5 Komponen Bimbingan Kelompok	19
2.2.6 Tahap Bimbingan Kelompok.....	21
2.2.7 Keunggulan Layanan Bimbingan Kelompok.....	22
2.3 Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok	24
2.3.1 Faktor Internal	24
2.3.2 Faktor Eksternal	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	46
3.1.1 Jenis Penelitian.....	46
3.1.2 Desain Penelitian.....	47
3.2 Variabel Penelitian	48
3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian.....	48
3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	50

3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	51
3.3.1	Populasi.....	51
3.3.2	Sampel.....	53
3.4	Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	54
3.4.1	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.4.2	Instrumen Penelitian.....	56
3.5	Validitas, Reliabilitas, dan Hasil Uji coba Instrumen.....	60
3.5.1	Validitas.....	60
3.5.2	Reliabilitas.....	62
3.5.3	Hasil Uji Coba.....	63
3.6	Teknik Analisis Data.....	63
3.6.1	Analisis Distribusi Frekuensi	64
3.6.2	Analisis Faktor	67
 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	70
4.1.1	Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok	71
4.1.2	Faktor Internal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok	79
4.1.3	Faktor Eksternal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok	83
4.2	Pembahasan	88
4.2.1	Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok	88
4.2.2	Faktor Internal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok.....	90
4.2.3	Faktor Eksternal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok	95
4.3	Keterbatasan Penelitian	102
 BAB 5 PENUTUP		
5.1	Simpulan	103
5.2	Saran	104
 DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN		108

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
3.1 Populasi Konselor di SMK Se-Kota Pekalongan.....	56
3.2 Kisi-kisi Instrumen Angket Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan layanan Bimbingan Kelompok.....	61
3.3 Penskoran Kategori Jawaban Angket	64
3.4 Kategori Tingkatan Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok.....	70
3.5 Kategori Interpretasi Skor Koefisien Korelasi.....	73
4.1 Nilai <i>Measure of Sampling Adequacy</i> (MSA) Per Indikator Variabel.....	76
4.2 Nilai <i>Communalities</i> Per Indikator Variabel.....	77
4.3 Pembentukan Faktor Per Indikator Variabel.....	78
4.4 Hasil Analisis faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.....	81
4.5 Urutan Kedudukan Faktor Internal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan kelompok.....	78
4.6 Hasil analisis deskriptif persentase faktor internal.....	80
4.7 Data latar belakang pendidikan konselor di SMK Se-Kota Pekalongan.....	82
4.8 Urutan Kedudukan Faktor Eksternal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan kelompok.....	84
4.9 Hasil analisis deskriptif persentase faktor Eksternal.....	85

DAFTAR DIAGRAM

Grafik	Halaman
4.1 Hasil Analisis Faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.....	78
4.2 Urutan kedudukan persentase faktor internal.....	79
4.3 Persentase komponen faktor Internal	80
4.4 Persentase latar belakang pendidikan konselor.....	82
4.5 Urutan Kedudukan Persentase Faktor Eksternal.....	84
4.6 Persentase Komponen Eksternal	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Komponen Variabel Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok.....	50
3.2 Langkah Penyusunan Instrumen.....	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang disediakan oleh bimbingan dan konseling yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar memahami permasalahan umum yang tengah marak terjadi di lingkungannya, serta belajar untuk berinteraksi dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling sendiri tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk kelompok namun dilaksanakan pula dalam bentuk klasikal dan individual, akan tetapi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dipandang perlu dan harus tetap dijalankan karena ada banyak kebutuhan siswa yang belum terpenuhi saat melayani dengan format klasikal dan tidak cukup efisien apabila diadakan konseling individu untuk masing masing siswa yang dibina.

Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif ketika mengadakan komunikasi antar pribadi dengan orang lain. Winkel & Sri Hastuti (2006: 565) menegaskan bahwa Bimbingan Kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri.

Sementara itu, Dewa Ketut Sukardi (2008: 78) juga menyatakan bahwa:

Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/konselor) dan/atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (tertentu) yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari baik sebagai individu maupun pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan/ tindakan tertentu.

Layanan bimbingan kelompok dilapangan saat ini sudah mulai di tinggalkan, dan bahkan cenderung tidak dilaksanakan karena beberapa faktor baik dari faktor dalam diri konselor selaku penyelenggara kegiatan bimbingan kelompok ataupun faktor dari luar diri konselor yang berpengaruh langsung dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Salah satu contoh faktor dalam diri konselor adalah latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan bidang bimbingan dan konseling sehingga konselor kurang berkompeten untuk dapat menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok. Faktor dari luar diri konselor yang berpengaruh langsung adalah rasio antara jumlah konselor dengan siswa yang dibina tidak menunjukkan jumlah yang sesuai. Faktor ini jelas berbeda dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0433/P/1993 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 25 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang menjelaskan jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh seorang konselor adalah 150 orang.

Kenyataan yang sering dijumpai dilapangan dalam satu sekolah hanya terdapat beberapa konselor bahkan ada sekolah yang tidak memiliki konselor sama sekali. Padahal dilapangan siswa yang ada disekolah membutuhkan pelayanan yang cukup guna menunjang perkembangan dirinya baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir yang dalam hal ini adalah merupakan tugas dan kewajiban dari seorang konselor.

Volume kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang harus dilaksanakan di sekolah adalah (a) layanan orientasi berkisar 4 – 6 %; (b) layanan informasi berkisar 10 – 12 %; (c) layanan penempatan dan penyaluran berkisar 5 – 8 %; (d) layanan penguasaan konten berkisar 12 – 15 %; (e) layanan konseling perorangan berkisar 12 – 15 %; (f) layanan bimbingan kelompok berkisar 12 – 20 %; (g) layanan konseling kelompok berkisar 12 – 15 %; (h) aplikasi instrumentasi berkisar 4 – 8 %; (i) himpunan data dilaksanakan terus menerus; (j) konferensi kasus berkisar 5 – 8 %; (k) kunjungan rumah berkisar 5 – 8 %; dan (l) alih tangan kasus berkisar 0 – 2 % (Hikmawati, 2011: 12).

Berdasarkan data di atas layanan bimbingan kelompok memiliki jumlah volume kegiatan paling tinggi jika dibandingkan dengan layanan yang lain, namun di lapangan layanan ini cenderung tidak dilaksanakan oleh konselor sekolah.

Melihat dari format pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, sebenarnya justru layanan yang menggunakan format kelompok yang dinilai paling efektif apabila menginginkan seluruh peserta didik terlayani dengan baik dengan menghemat waktu pelaksanaan karena dalam satu kelompok layanan bimbingan kelompok dapat terdiri dari delapan sampai lima belas siswa, apabila

dalam satu kelas terdiri dari empat puluh siswa maka konselor cukup membagi kelas kedalam lima kelompok yang masing masing berisi delapan siswa dan dapat mulai melaksanakan bimbingan kelompok dengan cara bergilir waktu pelaksanaan.

Manfaat lain dari segi keefektifan waktu pelaksanaan dari layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan kelompok cenderung menjadi primadona dalam interaksi antara konselor dengan siswa karena dalam format kelompok yang duduk melingkar, seluruh anggota kelompok dapat melihat dan memperhatikan satu sama lain sehingga tidak ada yang merasa terabaikan, saat mengadakan *ice breaking* dan permainan pun seluruh anggota kelompok dapat ikut serta dan memiliki perannya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinamika kelompok akan lebih mudah untuk terbentuk di bandingkan saat pelaksanaan *ice breaking* dan permainan untuk format klasikal.

Siswa yang dibimbing dalam kegiatan bimbingan kelompok akan cenderung lebih terbuka dan mau mengeluarkan pendapat karena dinamika kelompok yang terjadi pada saat layanan bimbingan kelompok, dalam bimbingan kelompok dapat diketahui pula tingkat pemahaman masing masing anggota kelompok dengan menggunakan pertanyaan pertanyaan kunci serta dari laiseg secara lisan setelah kegiatan selesai, konselor dapat langsung mengambil tindak lanjut dari kegiatan tersebut apakah akan dilaksanakan layanan bimbingan kelompok selanjutnya ataukah harus diganti dengan layanan individual ataupun justru diganti dengan layanan secara klasikal. Itulah alasannya mengapa

sebenarnya layanan bimbingan kelompok menjadi primadona dalam melayani siswa di sekolah.

Prayitno (1995:77) menjelaskan bahwa penyelenggaraan bimbingan kelompok memerlukan beberapa persiapan diantaranya yaitu:

Persiapan menyeluruh yang salah satunya adalah persiapan fisik yaitu tempat dan kelengkapannya, dan persiapan ketrampilan yaitu didalamnya terdapat beberapa teknik-teknik konseling perorangan yang harus dimiliki konselor untuk dapat mewujudkan dinamika yang baik didalam kelompok.

Apabila dalam persiapan penyelenggaraan terdapat salah satu yang tidak terpenuhi, maka hal tersebut bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan bimbingan kelompok. Misalnya saja apabila seorang konselor tidak dibekali dengan ketrampilan untuk melakukan bimbingan kelompok maka dinamika kelompok tidak dapat terwujud dengan baik dan suasana kelompok akan mati serta anggota akan cenderung lebih pasif.

Oleh karena itu, mengapa banyak disarankan untuk menggunakan layanan bimbingan kelompok dalam melayani siswa disekolah karena melihat banyaknya manfaat dan keunggulan dari layanan bimbingan kelompok ini. Namun sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada dilapangan, dimana layanan bimbingan kelompok untuk sebagian sekolah masih belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan konselor sekolah, dan masih banyak hal lain yang menyebabkan tidak terlaksananya layanan bimbingan kelompok, hal ini sesuai dengan survai awal yang dilakukan oleh peneliti di lima SMK di Kota Pekalongan sebagai sampel data awal.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu konselor di SMK Negeri 3 secara umum layanan bimbingan kelompok sudah tercantum dalam program BK di sekolah namun untuk pelaksanaannya masih sangat jarang dilaksanakan dan tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam program, dalam menyusun program konselor tidak melakukan *need assessment* terlebih dahulu, sedangkan hasil dari wawancara awal dengan konselor di SMK Negeri 2 Pekalongan layanan bimbingan kelompok pernah diselenggarakan beberapa kali saja, dan baru di cobakan untuk siswa kelas XII dengan cara membagi siswa dalam kelompok-kelompok secara bersamaan, sedangkan untuk kelas X dan XI belum pernah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya bimbingan kelompok hanya menggunakan topik bebas, Untuk tahapan tahapan yang dilaksanakan dalam proses bimbingan kelompok itu sendiri masih belum sesuai dengan aturan baku operasionalisasi pelaksanaan bimbingan kelompok, dan belum ada evaluasi atau tindak lanjut yang dilakukan oleh konselor setelah memberikan layanan bimbingan kelompok tersebut. Tidak jauh berbeda di SMK N 1 Pekalongan tidak dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok karena kebijakan yang ditetapkan oleh kepala sekolah kurang berpihak kepada konselor, yaitu konselor tidak mendapat jam pelajaran bimbingan konseling disekolah sehingga konselor merasa kesulitan untuk melaksanakan program BK yang sudah disusun.

Sejalan dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan kelompok di SMK Negeri 1, di SMK Perikanan Irma layanan bimbingan kelompok hanya sebatas tercantum dalam program bimbingan dan konseling saja dan tidak dijalankan sesuai dengan volume ideal pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, hal ini

dikarenakan konselor yang ada disekolah adalah bukan berasal dari lulusan jurusan bimbingan dan konseling dan menjalankan tugas ganda sebagai guru kimia. Kemudian di SMK Baitussalam layanan bimbingan kelompok hanya tercantum dalam program bimbingan dan konseling namun belum dilaksanakan sesuai dengan volume ideal pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Apabila isu negatif mengenai ketidaklaksanaan layanan Bimbingan kelompok ini tidak segera ditindaklanjuti maka akan dapat menghambat kegiatan pengembangan diri peserta didik, kebutuhan siswa yang seharusnya dipenuhi melalui layanan Bimbingan kelompok masih sangat minim yang bisa tersalurkan, mengganggu pelaksanaan program BK di sekolah serta kurang optimalnya kinerja konselor di sekolah.

Berdasarkan fenomena yang merebak di sekolah mengenai ketidaklaksanaan layanan Bimbingan kelompok, penulis ingin mengetahui tentang **“Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2012/2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi faktor determinan dari ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013?

- 2) Faktor internal manakah yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013?
- 3) Faktor eksternal manakah yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui :

- 1) Faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013.
- 2) Faktor internal yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013.
- 3) Faktor eksternal yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan tahun ajaran 2012/2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memberikan bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau masukan kepada konselor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab konselor secara profesional. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan tentang faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidak terlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Konselor

Konselor dapat mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok baik dari dalam diri maupun dari luar diri sebagai pelaksana layanan bimbingan kelompok.

1.4.2.2 Bagi Sekolah

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka memberikan potret langsung faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok, dan terakhir bagian akhir.

1.5.1 Bagian Awal Skripsi

bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

1.5.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab 1 Pendahuluan : Bab ini berisi tentang gambaran secara keseluruhan isi skripsi. Dalam pendahuluan dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab 2 Landasan Teori : Pada bab ini terdapat kajian pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi judul skripsi, serta keterangan yang merupakan landasan teoritis terdiri dari: teori mengenai faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Bab 3 Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, variabel penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi antara lain: Penyajian Data, Analisis Data, serta Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab 5 Penutup : Pada bab ini penulis memberikan interpretasi atau simpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diajukan guna menunjang perbaikan.

1.5.3 Bagian akhir skripsi

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, yang meliputi: (1) Penelitian terdahulu; (2) Layanan Bimbingan Kelompok; (3) Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok di SMK Ma'arif NU Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009* menjelaskan bahwa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Ma'arif NU Tirto adalah karena kurangnya faktor sarana dan prasarana, serta kerjasama konselor sekolah dengan personil sekolah untuk lebih mensosialisasikan program pelayanan BK khususnya layanan bimbingan kelompok kepada siswa. (Muhammad Tajul Arifin, 209: ix).

Penelitian dalam skripsi yang berjudul *Keefektifan Bimbingan kelompok Terhadap Peningkatan Kemampuan Berinteraksi Sosial Pada Siswa Kelas XI di SMA N 2 Ungaran Tahun Ajaran 2007/2008* menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan perlakuan termasuk kedalam kategori rendah dengan rata-rata presentase 31,16 % dan setelah mendapatkan perlakuan rata-rata presentasinya menjadi 78,83 % dengan demikian mengalami peningkatan sebanyak 47,57%, hasil dari uji wilcoxon menunjukkan bahwa nilai $Z_{hitung} = -2,803 > Z_{tabel} = 1,96$.

Hasil tersebut membuktikan bahwa layanan bimbingan kelompok efektif terhadap peningkatan kemampuan berinteraksi sosial siswa. (Rais Kusuma, 2008: x).

Penelitian dalam skripsi yang berjudul *Upaya Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri Remaja Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Kelayan Panti Bina Remaja Wira Adi Karya Ungaran Tahun 2010* mengungkapkan bahwa tingkat kemampuan penyesuaian diri kelayan sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok berada pada kategori cukup, dan setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok kemampuan penyesuaian diri kelayan meningkat berada pada kategori tinggi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan penyesuaian diri kelayan dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. (Kusdiarti, 2010: ix).

Penelitian dalam jurnal yang berjudul *Bimbingan kelompok solusi efektif untuk menjawab krisis karakter peserta didik* menjelaskan bahwa pada perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, siswa cenderung melupakan budaya timur dan menganut gaya hidup westernisasi sehingga pemerintah meresahkan keadaan yang demikian sehingga muncullah wacana untuk melaksanakan pendidikan karakter disekolah agar nilai-nilai karakter bangsa tetap terjaga. Pendidikan karakter disekolah tidak dapat dilakukan oleh pendidik yang tidak menunjukkan nilai-nilai karakter tersebut dalam tingkah lakunya karena pendidikan karakter membutuhkan teladan yang dijadikan panutan oleh peserta didik. Konselor selaku salah satu pendidik disekolah yang memberikan pelayanan konseling disekolah dapat melakukan perannya dengan memberikan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok

merupakan layanan primadona, yang sangat efektif dalam menanamkan nilai karakter kepada peserta didik. Pelaksanaan pembahasan topik pada bimbingan kelompok yang dikaitkan dengan nilai karakter, diharapkan dapat memperbaiki pemahaman peserta didik tentang tingkah laku yang tidak berkarakter selama ini. (Fadhilla Yusri 2011: 124)

Keterkaitan penelitian di atas yang menyebutkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah dari kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia serta kerjasama konselor dengan personil sekolah yang lain untuk lebih mensosialisasikan layanan bimbingan kelompok. Sedangkan di lain sisi beberapa manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah efektif untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial, penyesuaian diri, dan juga merupakan solusi efektif untuk melakukan pendidikan karakter kepada peserta didik disekolah. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila layanan bimbingan kelompok yang sebenarnya merupakan layanan primadona dan sangat efektif untuk menunjang kebutuhan peserta didik tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya sebagaimana yang sudah tertulis dalam program bimbingan dan konseling.

2.2 Layanan Bimbingan Kelompok

2.2.1 Pengertian Bimbingan Kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok dinilai berhasil dan sukses jika di dalamnya terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif ketika mengadakan komunikasi antarpribadi sesama anggota kelompok.

Bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa (Romlah, 2001: 3).

“Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri” (Winkel & Sri Hastuti, 2004: 565). Sedangkan menurut Wibowo (2005: 17) “bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”.

Layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/konselor) dan/atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (tertentu) yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari baik sebagai individu maupun pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan/tindakan tertentu (Sukardi 2008: 78).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh konselor kepada siswa dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang berguna untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan yang tepat dan dapat berkembang secara optimal.

2.2.2 Tujuan Bimbingan Kelompok

Bennet (Romlah, 2001: 14) mengemukakan tujuan bimbingan kelompok sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan-kesempatan pada siswa belajar hal-hal penting yang berguna bagi pengarahannya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial. Tujuan ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan:
 - a) Bantuan dalam mengadakan orientasi kepada situasi sekolah baru dan dalam menggunakan kesempatan-kesempatan dan fasilitas yang disediakan sekolah.
 - b) Mempelajari masalah-masalah hubungan antarpribadi yang terjadi dalam kelompok dalam kehidupan sekolah yang dapat mengubah perilaku individu dan kelompok dalam cara yang dapat diterima oleh masyarakat.
 - c) Mempelajari sekelompok masalah-masalah pertumbuhan dan perkembangan, belajar menyesuaikan diri dalam kehidupan orang dewasa, dan menerapkan pola hidup yang sehat.
 - d) Mempelajari secara kelompok dan menerapkan metode-metode pemahaman diri mengenai sikap, minat, kemampuan, kepribadian, kecenderungan-kecenderungan sifat, dan penyesuaian pribadi serta sosial.
 - e) Mempelajari secara kelompok dan menerapkan metode-metode belajar efisien.
 - f) Mempelajari secara kelompok dunia pekerjaan, dan masalah-masalah penyesuaian dan kemajuan pekerjaan.
 - g) Bantuan secara kelompok untuk mempelajari bagaimana membuat rencana-rencana pekerjaan jangka panjang.
 - h) Bantuan secara kelompok tentang cara membuat rencana pendidikan jangka panjang
 - i) Bantuan untuk mengembangkan patokan-patokan nilai untuk pilihan-pilihan dalam berbagai bidang kehidupan, dan dalam mengembangkan filsafat hidup.

- 2) Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok dengan:
 - a) Mempelajari masalah-masalah manusia pada umumnya
 - b) Menghilangkan ketegang-ketegangan emosi, menambah pengertian mengenai dinamika kepribadian, dan mengarahkan kembali energi yang terpakai untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam suasana yang permisif.
 - c) Untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan secara lebih ekonomis dan efektif daripada melalui kegiatan bimbingan individual.
 - d) Untuk melaksanakan anggota kelompok individual secara lebih efektif.

Tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno (1995: 179) adalah setiap siswa:

- (1) Mampu berbicara di depan orang banyak, (2) mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak, (3) belajar menghargai pendapat orang lain, (4) bertanggung jawab atas pendapat yang dikembangkannya, (5) mampu mengendalikan diri dan emosi, (6) dapat bertenggang rasa, (7) menjadi akrab satu sama lain, (8) membahas suatu masalah atau topik-topik umum yang dirasakan menjadi kepentingan bersama.

“Tujuan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari pemimpin kelompok konselor sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun pelajar, anggota, keluarga dan masyarakat” (Mugiarso dkk, 2010: 66).

“Tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yakni pengembangan pribadi, pembahasan topik-topik atau masalah-masalah umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok sehingga terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang dibahas” (Wibowo, 2005: 18).

Jadi, secara umum tujuan bimbingan kelompok ada dua yaitu pengembangan pribadi anggota dan pembasan topik secara mendalam. Pengembangan pribadi meliputi pengembangan segala potensi dan keterampilan sosial yang dimiliki. Sedangkan pembahasan masalah adalah sebagai upaya preventif agar terhindar dari permasalahan yang dibahas.

2.2.3 Fungsi Bimbingan Kelompok

Secara umum fungsi bimbingan kelompok adalah sebagai media pemberi bantuan kepada siswa dalam suasana kelompok melalui informasi yang disajikan didalamnya. Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sebagai individu. Menurut Mugiarto (2005: 66) fungsi utama bimbingan kelompok yaitu fungsi pemahaman dan pengembangan.

- 1) Fungsi Pemahaman dalam hal ini maksudnya adalah siswa yang dapat memahami berbagai informasi yang terkandung dalam kegiatan bimbingan kelompok.
- 2) Sedangkan fungsi pengembangan adalah dengan mengikuti bimbingan kelompok, maka kemampuan siswa baik dalam hal komunikasi maupun sosialisasi dapat berkembang secara optimal.

2.2.4 Jenis Bimbingan Kelompok

Menurut Prayitno (1995: 25) dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terdapat dua jenis kegiatan kelompok, yaitu bimbingan kelompok bebas dan bimbingan kelompok tugas.

- 1) Bimbingan kelompok bebas

Bimbingan kelompok bebas adalah bimbingan kelompok yang dalam kegiatannya setiap anggota bebas mengungkapkan masalahnya, menentukan arah dan tujuan kegiatannya sendiri. Ciri-ciri khusus bimbingan kelompok bebas yaitu:

- a) Anggota-anggota dalam kelompok bebas melakukan kegiatannya tanpa penugasan tertentu dan kehidupan dalam kelompok ini belum disiapkan secara khusus sebelumnya.
- b) Perkembangan yang timbul dalam kelompok akan menjadi isi dan akan mewarnai kehidupan kelompok ini lebih lanjut.
- c) Dalam kelompok bebas, diberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan isi dan arah kehidupan kelompok itu sendiri.
- d) Didalam model kelompok ini, peranan pemimpin kelompok tidak lebih hanya sebagai petunjuk jalan, pengatur lalu lintas, wasit, juru damai, dan sesekali mengambil alih kekuasaan apabila terjadi kemacetan atau kevakuman.

2) Bimbingan kelompok tugas

Dalam bimbingan kelompok tugas terlihat lebih terikat karena mereka terfokus pada penyelesaian tugas yang telah diberikan. Secara umum dalam kelompok tugas terdapat ciri-ciri khusus, antara lain:

- a) Dalam kelompok tugas arah dan isi kegiatan kelompok ditetapkan terlebih dahulu.
- b) Sesuai dengan namanya kelompok tugas pada dasarnya diberi tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik pekerjaan ini ditugaskan oleh pihak luar kelompok ini maupun tumbuh dalam kelompok itu sendiri sebagai hasil dari kegiatan kelompok itu sebelumnya.

- c) Di dalam kelompok tugas perhatian diarahkan kepada satu titik pusat yaitu penyelesaian tugas, semua anggota hendaknya mencurahkan perhatian untuk tugas yang dimaksud itu sebagai bukti bahwa dinamika kelompok yang terbentuk diarahkan untuk penyelesaian tugas itu.
- d) Meskipun dalam kelompok tugas itu masing-masing anggota terikat pada penyelesaian tugas, tetapi pengembangan diri setiap anggota kelompok tidak boleh diabaikan.
- e) Peranan pemimpin kelompok dalam kelompok tugas adalah menjadi pemimpin kelompok. Namun bisa saja pemimpin kelompok menunjuk anggota lain untuk menjadi pemimpin kelompok dalam tahap pembahasan masalah. Pemimpin kelompok harus tetap memberikan dorongan semangat, menjadi nara sumber yang membuka diri seluas-luasnya serta menjadi pengatur irama apabila terjadi kemacetan yang tidak memungkinkan seluruh anggota dapat menanggapi.

2.2.5 Komponen Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok ada komponen-komponen yang harus diketahui sehingga bimbingan kelompok dapat berjalan. Menurut Prayitno (2004: 4) menjelaskan bahwa komponen dalam bimbingan kelompok, yaitu pemimpin kelompok, anggota kelompok dan dinamika kelompok. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang komponen bimbingan kelompok, yaitu:

1) Pemimpin Kelompok

Pemimpin kelompok (PK) adalah pemimpin kelompok yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik anggota kelompok profesional.

Sebagaimana untuk jenis layanan anggota kelompok lainnya, pemimpin kelompok memiliki keterampilan khusus menyelenggarakan bimbingan kelompok secara khusus, PK diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok antara semua siswa seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan umum dalam bimbingan kelompok.

2) Anggota Kelompok

Tidak semua kumpulan atau individu dapat dijadikan anggota bimbingan kelompok. Untuk terselenggaranya bimbingan kelompok seorang pemimpin kelompok harus membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki pernyataan seperti tersebut diatas. Besarnya kelompok dan homogenitas/heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kekurang efektifan kelompok akan terasa jika jumlah kelompok melebihi sepuluh orang (Prayitno, 2004: 9).

3) Dinamika Kelompok

Menurut Wibowo (2005:61) Dinamika kelompok adalah “suatu studi yang menggambarkan berbagai kekuatan yang menentukan perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan”.

Dinamika kelompok merupakan “sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok; artinya merupakan pengarahan secara serentak semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu”. Dengan demikian, dinamika

kelompok merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok (Prayitno, 1995:23).”

2.2.6 Tahap Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok

Pada dasarnya dalam bimbingan kelompok terdapat empat tahap yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran (Prayitno, 2004: 18). Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

2.2.6.1 Tahap Pembentukan

Tahapan pembentukan adalah tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a) Mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan bimbingan kelompok.
- b) Menjelaskan cara dan asas kegiatan bimbingan kelompok.
- c) Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri.
- d) Mengadakan permainan untuk menghangatkan dan mengakrabkan.

2.2.6.2 Tahap Peralihan

Tahap peralihan adalah tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Tahap ini meliputi kegiatan:

- a) Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan.
- b) Menawarkan sambil mengamati apakah anggota kelompok siap untuk memasuki tahap berikutnya.
- c) Membahas suasana yang terjadi.
- d) Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota.

2.2.6.3 Tahap Kegiatan

Tahap kegiatan dapat juga disebut sebagai tahap inti. Pada tahap ini anggota kelompok dengan dipimpin pemimpin kelompok membahas topik tertentu sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok (bimbingan kelompok topik bebas) dan topik yang sudah disiapkan oleh pemimpin kelompok (Bimbingan kelompok topik tugas).

2.2.6.4 Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi:

- a) Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.
- b) Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil pada tahap kegiatan.
- c) Membahas kegiatan lanjutan.

2.2.7 Keunggulan Layanan Bimbingan Kelompok

2.2.7.1 Efisiensi Waktu

Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan sesuatu yang praktis dan efisien semakin meningkat karena padatnya aktifitas dan sedikitnya waktu luang menjadikan seseorang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dengan meminimalisir penggunaan waktu. Pada saat ini keadaan masyarakat sudah semakin terbuka, informasi dan mobilitas penduduk semakin tinggi, segala macam jenis kebutuhan meningkat baik jenis maupun intensitasnya, hal itu semua yang mengakibatkan semakin banyaknya orang yang memerlukan pelayanan yang tepat dalam waktu yang *relative* singkat.

Keadaan di lapangan untuk satu orang konselor di sekolah dengan jumlah siswa yang diampu melebihi jumlah ideal jelas menunjukkan keadaan yang tidak seimbang. Sedangkan di sisi lain jumlah *volume* kegiatan layanan bimbingan kelompok yang harus di lakukan oleh konselor di sekolah mendapat prosentase paling tinggi yaitu berkisar antara 12 - 20% (Hikmawati, 2011: 12) sehingga layanan bimbingan kelompok dianggap penting dan tetap harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang belum terpenuhi dari layanan klasikal maupun individual. Sesuai dengan pendapat Jacobs,dkk (1994, dalam Wibowo,2005: 44) menyebutkan bahwa “ada dua pertimbangan dalam penggunaan kelompok, yang pertama adalah kepentingan efisiensi dan yang kedua sumber yang didapatkan dari format kelompok”. Layanan bimbingan kelompok lebih mengarah pada sekelompok individu secara umum dengan satu kali kegiatan layanan ini dapat memberikan manfaat kepada sejumlah orang sehingga dipandang cukup efektif dan efisien apabila digunakan oleh konselor untuk melayani sejumlah peserta didik dengan keterbatasan waktu yang dimiliki.

2.2.7.2 *Dinamika Kelompok*

Dalam layanan bimbingan kelompok interaksi antar anggota individu adalah sesuatu yang khas, yang tidak mungkin terjadi pada konseling perorangan. Dengan interaksi sosial yang intensif dan dinamis selama berlangsungnya layanan diharapkan tujuan dari layanan dapat tercapai dengan lebih mantap. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prayitno (1995: 3) dinamika kelompok adalah “sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok, artinya merupakan pengerahan secara serentak semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu”.

Melalui dinamika kelompok terdapat banyak manfaat untuk semua anggota kelompok mulai dari kesempatan mengemukakan pendapat, mengungkapkan tanggapan, dan reaksi yang sesuai dengan topik yang dibahas sehingga interaksi yang multiarah ini yang memudahkan seluruh anggota kelompok untuk dapat mencapai tujuan dari layanan bimbingan kelompok. Secara umum manfaat dari dinamika kelompok adalah suatu proses pengembangan pribadi dari masing-masing anggota kelompok bagaimanapun suasana kelompok yang ditimbulkan apakah menggembirakan atau sebaliknya, dan secara khusus manfaat dari dinamika kelompok adalah pemecahan masalah pribadi para anggota kelompok sesuai dengan topik yang tengah dibahas.

2.3 Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Secara garis besar faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di kelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal adalah latar belakang pendidikan konselor, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan yang termasuk di dalam faktor eksternal adalah beban tugas konselor, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan sarana dan prasarana.

2.3.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang berkaitan dengan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah maka faktor internalnya adalah konselor selaku penyelenggara dari kegiatan

bimbingan kelompok. Seorang konselor sangat berperan terhadap keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling disekolah pada umumnya dan keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada khususnya, Efektif atau tidaknya pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling disekolah dapat dilihat dari kinerja yang ditampilkan oleh konselor, apakah konselor tersebut memiliki kemampuan yang baik dan berkompeten dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling karena seorang konselor harus memenuhi kriteria dan persyaratan khusus yang sudah ditetapkan untuk dapat melaksanakan tugasnya disekolah.

Dalam penelitian kali ini yang menjadi faktor internal adalah: Latar belakang pendidikan konselor, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.

2.3.1.1 Latar Belakang Pendidikan Konselor

Seorang konselor sekolah untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menampilkan kinerja yang berkualitas, ia harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Hal ini selaras dengan pendapat Prayitno (2004: 6) bahwa konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan konseling.

Wingkel (2006: 167) mengungkapkan, konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang menempuh pendidikan khusus diperguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Hikamawati (2011: 43) juga mengungkapkan bahwa konselor pendidikan adalah

konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik disuatu pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat diartikan bahwa konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional dalam bimbingan dan konseling yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah.

Konselor sekolah dengan menempuh pendidikan perguruan tinggi jurusan Bimbingan dan Konseling, diharapkan memiliki karakteristik konselor yang mempengaruhi bimbingan dan konseling seperti yang dijelaskan oleh Syamsu Yusuf dan Nurihsan (2006: 37) sebagai berikut:

1. Pemahaman Diri (*Self-Knowledge*)

Pengetahuan diri sendiri mempunyai makna bahwa konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan mengapa melakukan itu, masalah yang dihadapi, dan masalah klien yang terkait dengan konseling.

2. Kompeten

Kompeten adalah memiliki makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki oleh konselor untuk membantu klien.

3. Kesehatan Psikologis

Karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik antara lain:

- a. Mencapai pemuasan kebutuhan seperti kebutuhan rasa aman, cinta, kekuatan, dan seks.

- b. Dapat mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya.
- c. Menyadari kelemahan atau keterbatasan kemampuan dirinya.
- d. Tidak hanya mencapai kelestarian hidup, tetapi mencapai kehidupan dalam kondisi yang baik.

4. Dapat Dipercaya

Dapat dipercaya mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai satu ancaman bagi klien dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberi rasa aman.

5. Jujur

Kejujuran yang mutlak mempunyai makna bahwa seorang konselor harus terbuka, autentik, dan sejati dalam penampilannya.

6. Kekuatan

Keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam, dapat membantu konselor dalam keseluruhan konseling.

7. Bersikap Hangat

Kehangatan mempunyai makna bahwa suatu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain.

8. Pendengar Aktif

Konselor sebagai pendengar yang aktif dalam proses konseling bersifat dinamis, tidak pasif. Melalui respon yang aktif konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan konseli.

9. Sabar

Melalui kesabaran konselor dalam proses konseling dapat membantu konseli untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sikap sabar konselor menunjukkan lebih memperhatikan diri konseli, konselor yang cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa.

10. Kepekaan

Kepekaan mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri konselor dan konseli.

11. Kesadaran Holistik

Konselor yang memiliki kesadaran holistik cenderung menampilkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks.
- b. Menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan mempertimbangkan tentang perlunya referral (rujukan).
- c. Akrab dan terbuka terhadap berbagai teori.

Pada rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 3) disebutkan bahwa “konselor adalah sarjana pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling dan telah menyelesaikan program pendidikan profesi konselor (PPK)”. Berdasarkan rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling, profesi konselor telah diakui secara undang-undang dan merupakan profesi yang profesional karena tidak dapat sembarang jurusan yang menjadi konselor akan tetapi hanya yang

memiliki ketrampilan dan berlatarbelakang bimbingan dan konseling yang dapat menjalankan tugas sebagai konselor di sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka konselor sekolah tidak dapat diperoleh dari luar jurusan bimbingan dan konseling yang kemudian melaksanakan tugas ganda, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam kinerja konselor di sekolah. Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling.

2.2.8.1 Kompetensi Konselor

Dalam pelaksanaan tugas sebagai konselor disekolah seorang konselor harus menguasai kompetensi yang sudah dipersyaratkan karena efektif atau tidaknya pelayanan bimbingan dan konseling disekolah sangat dipengaruhi oleh penguasaan kompetensi konselor. Kompetensi diartikan sebagai perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Mulyasa, 2002: 37).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Kompetensi merupakan sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran, akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Sebagai satu keutuhan kompetensi konselor merujuk pada penguasaan konsep, penghayatan,

dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu dan unjuk kerja profesional yang akuntabel (ABKIN, 2005: 96).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian kompetensi maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi konselor merupakan seperangkat pengetahuan atau kemampuan yang harus dimiliki konselor dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, yang berdasarkan pada kode etik profesi konselor. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap konselor akan menunjukkan kualitas konselor yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai konselor.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 konselor dimasukkan sebagai kategori pendidik. Oleh karena itu, konselor juga harus memiliki kompetensi guru yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Pedagogik
 - a. Menguasai teori dan praksis pendidikan
 - b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta perilaku konseli
 - c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling
- 2) Kompetensi Kepribadian
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih.
 - c. Mewujudkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat
 - d. Menampilkan kinerja yang berkualitas
- 3) Kompetensi Sosial
 - a. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja
 - b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling
 - c. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi

- 4) Kompetensi Profesional
 - a. Menguasai konsep dan praksis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli
 - b. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling
 - c. Merancang program bimbingan dan konseling yang komprehensif
 - d. Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling
 - e. Memiliki kesadaran komitmen terhadap etika profesional
 - f. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Konselor sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah, harus menguasai empat kompetensi di atas serta mengaplikasikannya dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Kompetensi konselor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Ketiga kompetensi ini dipandang lebih memiliki kontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

2.2.8.1.1 Kompetensi Kepribadian

Kepribadian menurut Daradjat dalam Sagala (2009: 33) adalah sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atsarinya saja.

Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang (Sagala, 2009: 33).

Kompetensi kepribadian konselor memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik terutama dalam membentuk

kepribadian peserta didik karena mereka belajar langsung dari figur seorang konselor disekolah. Mulyasa (2008: 117) menyatakan bahwa dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

1. Kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai konselor sekolah dengan baik dan profesional, seorang konselor harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa karena dengan pembawaan yang mantap siswa menjadi yakin dan percaya kepada konselor pada saat proses bimbingan berjalan. Kestabilan emosi konselor juga sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan. Pribadi konselor yang dewasa akan terbentuk dan berkembang seiring dengan pengalamannya dan bagaimana cara untuk memecahkan setiap masalah atas dasar pengalaman masa lalu.

2. Disiplin, arif, dan berwibawa

Siswa disekolah belajar dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, dalam upaya untuk mendisiplinkan siswanya tentu seorang konselor harus mampu untuk mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu. Pembentukan pribadi yang disiplin pada siswa, nantinya akan membantu siswa dalam: memecahkan masalah, mencegah timbulnya masalah, dan menuju pada pribadi yang mandiri. Seorang konselor perlu memiliki pribadi yang disiplin, arif, serta berwibawa. Pribadi yang berwibawa akan menjadikan siswa menghormati konselor disekolah

dan tidak mengurangi rasa percaya kepada konselor bahwa dia dapat berbagi cerita (curhat) dengan konselornya.

3. Menjadi teladan bagi peserta didik

Untuk menjadi teladan tentunya harus memiliki sesuatu yang baik yang dapat ditiru oleh siswa disekolah. Selalu menjaga sikap dan tindakan didepan siswa adalah kunci untuk dijadikan teladan yang baik.

4. Berakhlak mulia

Berakhlak mulia adalah sumber dari semua aspek yang sudah dikriteriakan sebagai seorang konselor yang memiliki kepribadian yang baik, kompetensi kepribadian guru yang berlandaskan akhlak mulia tidak tumbuh begitu saja tetapi memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa mengenal lelah dan diniatkan untuk beribadah.

Kompetensi kepribadian yang menggambarkan etika profesi menurut Slamet dalam Sagala (2009: 34) adalah sebagai berikut:

- a) Memahami, menghayati, dan melaksanakan kode etik guru Indonesia
- b) Memberikan layanan pendidikan dengan sepenuh hati, professional, dan ekspektasi yang tinggi terhadap peserta didiknya.
- c) Menghargai perbedaan latar belakang peserta didiknya dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya
- d) Menunjukkan dan mempromosikan nilai-nilai, norma-norma, sikap dan perilaku positif yang mereka harapkan dari peserta didiknya.
- e) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah pada umumnya dan pembelajaran khususnya
- f) Menjadikan dirinya sebagai bagian integral dari sekolah
- g) Bertanggung jawab terhadap prestasinya
- h) Melaksanakan tugasnya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koridor tata pemerintahan yang baik

- i) Mengembangkan profesionalisme diri melalui evaluasi diri, refleksi, dan pemutakhiran berbagai hal yang terkait dengan tugasnya
- j) Memahami, menghayati, dan melaksanakan landasan-landasan pendidikan: yuridis, filosofis, dan ilmiah.

Dengan mengacu pada kode etik guru, dapat dijadikan barometer atau tolak ukur bagaimana seharusnya seorang konselor bertindak, bersikap, dan berbuat dalam kesehariannya.

2.2.8.1.2 *Kompetensi Sosial*

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2008 bagian kesatu kompetensi pasal 3 ayat (6) yang mengatur tentang kompetensi guru menjelaskan bahwa:

- (6) kompetensi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
 - a) Komunikasi lisan, tulis dan atau syarat secara santun
 - b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 - c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.
 - d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku dan
 - e) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi sosial menurut Slamet dalam Sagala (2009: 38) terdiri dari Sub-

Kompetensi adalah sebagai berikut:

- a) Memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan
- b) Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- c) Membangun kerja tim (*teamwork*) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah
- d) Melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan.
- e) Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya.
- f) Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku dimasyarakat sekitar,
- g) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan profesionalisme).

Penguasaan konselor terhadap kompetensi sosial erat kaitannya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada khususnya, karena sebagai seorang pendidik di suatu instansi pendidikan seorang konselor adalah bagian dalam sistem yang membutuhkan interaksi dengan rekan sesama pendidik, dan para *stake holder*.

2.2.8.1.3 *Kompetensi Profesional*

Kompetensi profesional konselor adalah kemampuan yang harus dimiliki konselor yang mencakup penguasaan materi secara luas dan mendalam, kesadaran komitmen terhadap profesi serta penguasaan terhadap konsep dan praksis dalam bimbingan dan konseling.

Djojonegoro dalam Sagala (2009: 41) menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu:

- 1) Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi.
- 2) Memiliki kemampuan memperbaiki kemampuan (ketrampilan dan keahlian khusus).
- 3) Memperoleh penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian tersebut.

Oleh karena itu, dalam suatu profesi menuntut adanya:

- 1) Ketrampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar.
- 2) Keahlian bidang tertentu sesuai dengan profesinya
- 3) Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai
- 4) Adanya kerusakan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakan
- 5) Perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan
- 6) Kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- 7) Klien/objek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, dan guru dengan siswanya, dan pengakuan oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya dimasyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2008 bagian kesatu kompetensi pasal 3 ayat (7) yang mengatur tentang kompetensi guru menjelaskan bahwa:

- (7) kompetensi profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang kurangnya meliputi penguasaan:
- a. materi pelajaran secara luas, dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan
 - b. konsep dan metode disiplin keilmuan teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Seorang konselor dalam melaksanakan tugas pelayanan bimbingan konseling disekolah secara umum dapat terlihat dari penguasaannya dalam

kompetensi profesional, karena keunikan tugas konselor yang berbeda dengan guru bidang studi menuntut adanya kecakapan dari konselor dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

2.3.2 Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, berkaitan dengan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah maka faktor eksternalnya adalah faktor yang ada di luar diri konselor selaku penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat mempengaruhi kinerja konselor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penelitian kali ini yang termasuk kedalam faktor eksternal adalah Beban tugas konselor, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, dan Sarana dan Prasarana

2.3.2.1 Beban Tugas Konselor

Sesuai dengan ketentuan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1991, diharapkan dalam setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan yaitu konselor untuk 150 siswa (Sukardi, 2008: 96).

Karena kekhususan bentuk tugas dan tanggung jawab konselor sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban tugas atau penghargaan jam kerja guru pembimbing ditetapkan 36 jam/minggu. Adapun beban tugas tersebut meliputi (Sukardi, 2008: 97):

1. Kegiatan penyusunan program pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam.
2. Kegiatan melaksanakan pelaksanaan dalam bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam.
3. Kegiatan evaluasi pelaksanaan dalam bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam.
4. Sebagaimana guru mata pelajaran, konselor yang membimbing 150 siswa dihargai sebanyak 18 jam, selebihnya dihargai sebagai bonus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 10 - 15 siswa = 2 jam
 - b. 16 – 30 siswa = 4 jam
 - c. 31 – 45 siswa = 6 jam
 - d. 46 – 60 siswa = 8 jam
 - e. 61 – 75 siswa = 10 jam
 - f. 76 – atau lebih = 12 jam

Kenyataan yang sering ditemukan disekolah adalah tidak sebanding antara jumlah siswa yang ada dengan jumlah konselor. Dalam satu sekolah yang jumlah siswanya mencapai 1000 siswa hanya ada 3 konselor. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak segera mendapatkan solusi, maka berpengaruh terhadap kualitas pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah karena ketimpangan jumlah guru pembimbing dengan jumlah peserta didik.

Tugas dan tanggung jawab konselor menurut Hikmawati (2011: 23) dalam pelayanan bimbingan konseling secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mengadministrasi kegiatan bimbingan dan konseling;
2. Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis evaluasi;
3. Menganalisis hasil evaluasi;
4. Mengevaluasi proses hasil layanan bimbingan dan konseling;
5. Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling;
6. Melaksanakan layanan bidang bimbingan;
7. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling;
8. Merencanakan program bimbingan dan konseling;
9. Memasyarakatkan bimbingan dan konseling.

Peran utama konselor disekolah adalah menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling, namun pada kenyataannya disekolah ada konselor yang juga merangkap tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi kendala bagi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling karena keterbatasan waktu yang dimiliki konselor tidak seimbang dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan yang mana keduanya menuntut untuk diselesaikan dalam waktu yang relatif sama.

2.3.2.2 Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah seseorang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan disekolah, berkaitan dengan bimbingan dan konseling seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta memfasilitasi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling menurut Hikmawati (2011: 22):

1. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling;
2. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain;
3. Menyiapkan surat pernyataan;
4. Membuat surat tugas guru;
5. Menetapkan koordinator guru;
6. Melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan dan konseling;
7. Memberi kemudahan terlaksananya program bimbingan dan konseling;
8. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan;
9. Mengkoordinasi kegiatan pendidikan.

Sedangkan menurut Kurikulum SMA 1975 Buku III C tentang Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan dalam Soetjipto & Kosasi (2000: 100) tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah:

1. Membuat rencana/program sekolah secara menyeluruh.
2. Mendelegasikan tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
3. Mengawasi pelaksanaan program.
4. Melengkapi dan menyediakan kebutuhan fasilitas bimbingan dan Penyuluhan.
5. Mempertanggung jawabkan program tersebut baik ke dalam (sekolah) maupun ke luar (masyarakat).
6. Mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah dalam rangka kerja sama pelaksanaan bimbingan.
7. Mengkoordinasi kegiatan bimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam melaksanakan pelayanan Bimbingan dan Konseling khususnya pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang dalam penyelenggaraannya akan lebih efektif bila dilakukan diluar jam pelajaran seorang konselor tidak bisa melakukan seorang diri, konselor perlu bekerja sama dengan kepala sekolah untuk lebih mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

2.3.2.3 Guru Mata Pelajaran

Dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah seorang konselor tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan interaksi dengan siswa yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, karena interaksi antara konselor dengan siswa bisa dikategorikan sangat minim sesuai dengan jumlah jam tatap muka konselor yang hanya satu jam pelajaran dalam satu minggunya. Bahkan di

beberapa sekolah lain ada konselor yang tidak mendapat jam pelayanan bimbingan dan konseling sehingga jumlah jam tatap muka konselor semakin minim. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara konselor dengan guru mata pelajaran yang memiliki jumlah jam tatap muka lebih banyak dengan siswa sehingga dapat membantu pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah menurut Hikmawati (2011: 23):

1. Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan konseling;
2. Melakukan kerjasama dengan guru;
3. Memberikan kesempatan pada siswa memperoleh layanan bimbingan dan konseling;
4. Membantu mengumpulkan informasi;
5. Berpartisipasi kegiatan pendukung seperti konferensi kasus;
6. Berpartisipasi upaya pencegahan masalah pengembangan potensi.

Sedangkan menurut Kurikulum SMA 1975 Buku III C tentang Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan dalam Soetjipto & Kosasi (2000: 103-104) tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah:

1. Turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan program bimbingan dan konseling.
2. Memberikan informasi tentang siswa kepada staf bimbingan dan konseling.
3. Memberikan layanan instruksional (pengajaran)
4. Berpartisipasi dalam pertemuan kasus
5. Memberikan informasi kepada siswa
6. Meneliti kesulitan dan kemajuan siswa.
7. Menilai hasil kemajuan belajar siswa.
8. Mengadakan hubungan dengan orang tua siswa.
9. Bekerjasama dengan konselor mengumpulkan data siswa dalam usaha untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa.

10. Mengirimkan (*referral*) masalah siswa yang tidak dapat diselesaikannya kepada konselor.
11. Mengidentifikasi, menyalurkan, membina bakat.

Selain tugas dan tanggung jawab yang dimiliki, seorang guru mata pelajaran juga mempunyai peranan-peranan penting yang strategis apabila dibandingkan dengan guru pembimbing atau konselor. Berikut ini adalah peran guru dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling yaitu : guru sebagai *informatory*, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, dan guru sebagai kolaborator (Hikmawati 2011: 21).

Sejalan dengan pernyataan Roestiyah dalam Djamarah (2010: 38) tentang tugas dari seorang guru disekolah adalah:

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila.
3. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk memabawa anak didik ke arah kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.
4. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu.
5. Guru sebagai administrator dan manajer. Disamping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan disekolah secara demokratis sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.
6. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi, Orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang konselor /guru pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok disekolah tidak dapat terlepas dari kerjasama dengan guru mata pelajaran disekolah.

2.3.2.4 Wali Kelas

Selain guru mata pelajaran peranan dan tugas yang dimiliki oleh wali kelas juga tidak kalah penting dalam kontribusi pelayanan bimbingan konseling khususnya dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling menurut Hikmawati (2011: 24):

1. Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan,
2. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa,
3. Memberikan informasi tentang siswa dikelas;
4. Menginformasikan kepada guru tentang siswa yang perlu penanganan kasus;
5. Ikut serta dalam konferensi kasus.

Sedangkan menurut Kurikulum SMA 1975 Buku III C tentang Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan dalam Soetjipto & Kosasi (2000: 102- 103) tugas dan tanggung jawab wali kelas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah:

1. Mengumpulkan data tentang siswa.
2. Meneliti kemajuan dan perkembangan siswa (akademik, sosial, fisik, dan pribadi)
3. Mengawasi kegiatan siswa sehari-hari
4. Mengadakan kegiatan orientasi
5. Mengatur dan menempatkan siswa
6. Bekerjasama dengan konselor dalam membuat sosiometri dan sosiogram.
7. Mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan
8. Ikut serta dalam menyelenggarakan sendiri pertemuan kasus (*case conference*)

Berdasarkan penjelasan di atas maka wali kelas yang berperan sebagai orang tua siswa disekolah mempunyai peran yang positif pula dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan pelaksanaan layanan bimbingan dan kelompok pada khususnya.

2.2.2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari aktifitas pelayanan bimbingan dan konseling untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan pelayanan bimbingan dan konseling:

a. Sarana

Adapun sarana yang diperlukan untuk menunjang layanan bimbingan adalah (Sukardi, 2002: 63):

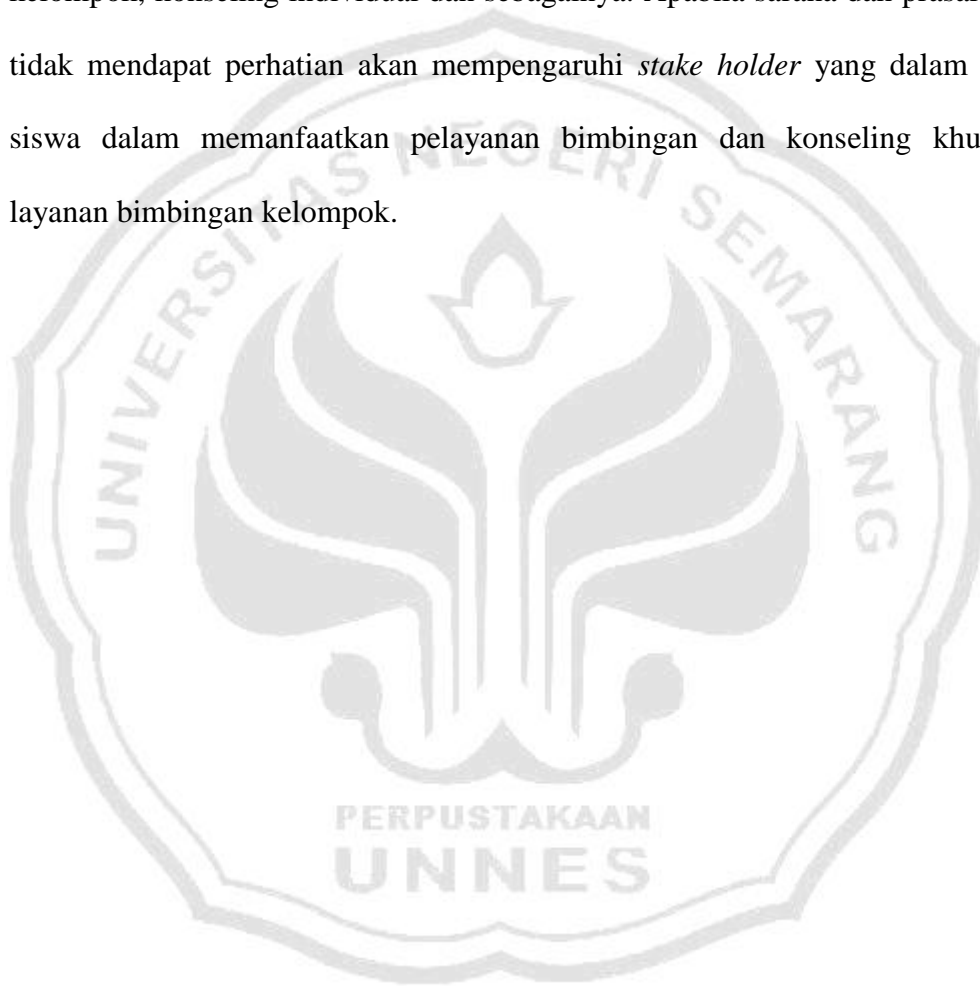
- 1) Alat pengumpul data, antara lain: format-format, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, catatan harian, daftar nilai prestasi belajar, kartu konsultasi, instrumen penelusuran bakat dan minat, dan sebagainya.
- 2) Alat penyimpanan data, seperti: kartu pribadi, buku pribadi, map dan sebagainya.
- 3) Perlengkapan teknis, yaitu: buku pedoman/petunjuk, buku informasi (pribadi, sosial, pendidikan, karir), paket bimbingan (pribadi, belajar, dan karier).
- 4) Perlengkapan non teknis, meliputi: blanko surat, agenda surat, alat-alat tulis, dan sebagainya.

b. Prasarana

Beberapa prasarana penunjang kegiatan bimbingan antara lain (Sukardi, 2002: 63):

- 1) Ruang Bimbingan, terdiri atas: ruang tamu, ruang konsultasi, ruang bimbingan kelompok/diskusi, ruang dokumentasi, dan sebagainya. Ruang tersebut sebaiknya dilengkapi dengan perabot seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, rak dan sebagainya.
- 2) Anggaran biaya untuk menunjang kegiatan layanan, seperti: anggaran biaya yang diperlukan untuk surat menyurat, transportasi, penataran, pembelian alat-alat dan sebagainya.

Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sering tidak mendapatkan perhatian. Tidak sedikit sekolah yang ruang bimbingan dan konselangnya tidak memenuhi syarat, misalnya ruang bimbingan dan konseling masih satu ruang dengan ruang UKS, tidak ada ruang untuk bimbingan kelompok, konseling individual dan sebagainya. Apabila sarana dan prasarana ini tidak mendapat perhatian akan mempengaruhi *stake holder* yang dalam hal ini siswa dalam memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling khususnya layanan bimbingan kelompok.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Didalam metode penelitian dijelaskan secara rinci mengenai urutan suatu penelitian, yang meliputi prosedur dan teknik penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya metode penelitian maka proses penelitian yang dilakukan dapat terarah untuk mencapai tujuan, secara baik dan tersistematis. Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian yang tepat akan memberikan hasil yang akurat.

Pada bab ini dibahas mengenai jenis dan desain penelitian; variabel penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel penelitian; metode pengumpulan data dan instrumen penelitian: validitas, reliabilitas dan hasil uji coba instrumen; serta teknik analisis data.

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:5) "Jenis penelitian dibedakan berdasarkan tujuan penelitiannya yang terdiri dari (a) penelitian dasar, (b) penelitian pengembangan (R&D), (c) penelitian terapan. Serta berdasarkan tingkat kealamiahannya tempat penelitian yang terdiri dari (a) penelitian eksperimen, (b) penelitian survey, (c) penelitian naturalistik."

Sesuai dengan judul penelitian ini yakni *Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Se-Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2012/2013*, maka penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif. Sukardi (2008:14) menjelaskan bahwa "melalui penelitian deskriptif para peneliti

berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis”.

Selain itu, menurut Azwar (1997:7), “penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.” Suryabrata (2006:75) menambahkan “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan objektif mengenai variabel yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis, akurat, dan objektif atas hasil penelitian mengenai faktor determinan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok. Deskripsi dilakukan berdasarkan hasil analisis secara kuantitatif dari instrumen penelitian.

3.1.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan dipakai oleh peneliti adalah penelitian Survei. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan kuesioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survei adalah “penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok” (Singarimbun, 2006: 3).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survai atau termasuk jenis penelitian deskriptif, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2008:6) bahwa penelitian survai digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan yang dimaksudkan tidak seperti dalam penelitian eksperimen).

Anggapan yang dipegang peneliti dalam menggunakan desain penelitian survai adalah karena dalam penelitian ini peneliti hanya ingin memotret keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan hasilnya akan didiskusikan dengan konselor untuk menjadi perhatian konselor di sekolah terkait.

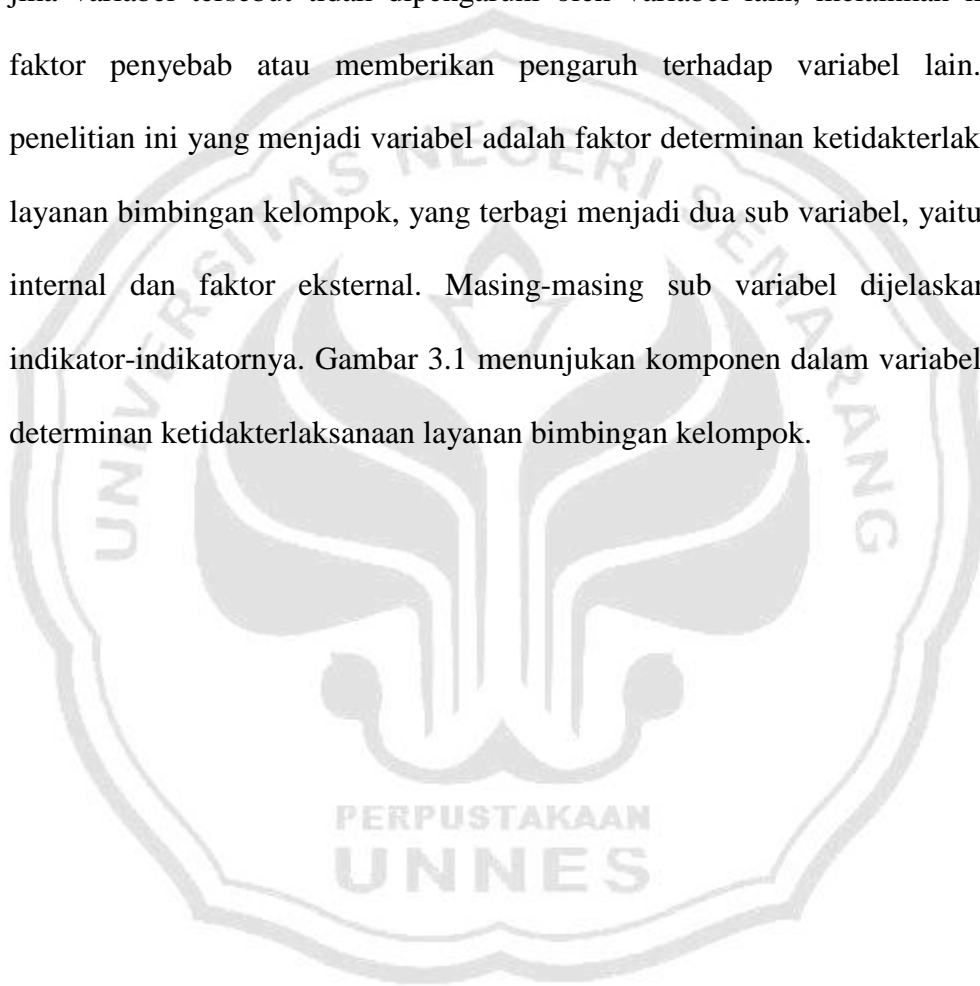
3.2 Variabel Penelitian

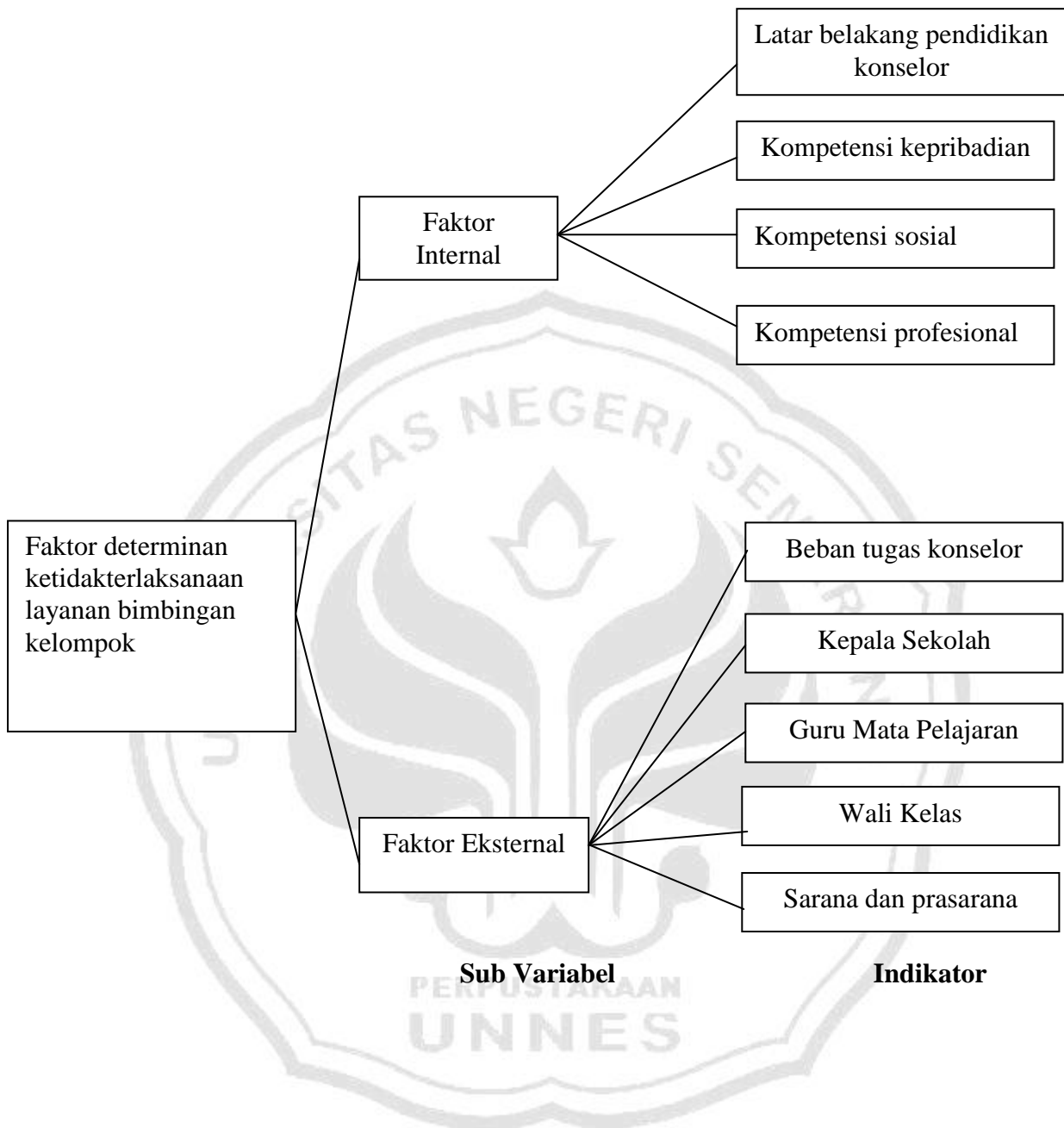
3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2006:118) “variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif (Azwar, 2003:59). Sedangkan Sugiyono (2007: 2) menyatakan bahwa “variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut”. Jadi, variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang akan diperoleh informasi tentang hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal dan bersifat bebas atau independen. Menurut Sugiyono (2005:3) “variabel bebas atau independen merupakan variabel stimulus, input atau prediktor.”

Berdasarkan penelitian di atas maka suatu variabel dikatakan independen jika variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel lain, melainkan menjadi faktor penyebab atau memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel adalah faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, yang terbagi menjadi dua sub variabel, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing sub variabel dijelaskan oleh indikator-indikatornya. Gambar 3.1 menunjukkan komponen dalam variabel faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.





Gambar 3.1
Komponen Variabel Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan
Layanan Bimbingan Kelompok

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Setelah variabel penelitian diidentifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun definisi operasional variabel. Tujuannya yaitu mempermudah peneliti untuk menyusun instrumen sebagai alat pengumpul data. Menurut Suryabrata (2006: 29) “definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat sifat variabel yang didefinisikan dan dapat diamati.” Merujuk dari pengertian tersebut maka yang dimaksud faktor determinan ketidak terlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah faktor yang paling dominan dari ketidak terlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang terdiri dari: faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal (berasal dari dalam diri konselor) merupakan faktor penentu yang diperkirakan memberikan kontribusi terhadap ketidak terlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang mencakup indikator: (a) latar belakang pendidikan konselor, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, dan (d) kompetensi profesional.
- 2) Faktor eksternal (berasal dari luar diri konselor) merupakan faktor penentu yang diperkirakan memberikan kontribusi terhadap ketidak terlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang mencakup indikator: (a) beban tugas konselor, (b) Kepala Sekolah, (c) Guru Mata Pelajaran, (d) Wali Kelas, (e) sarana dan prasarana.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah seluruh objek penelitian (Arikunto, 1997: 102). Objek penelitian ini minimal harus mempunyai satu sifat sama. Sedangkan Populasi menurut Sugiyono (2008: 80) ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Merujuk pengertian di atas, maka yang dimaksud populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai kualitas dan ciri tertentu, yang nantinya dijadikan wilayah generalisasi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh SMK di Kota Pekalongan yang berjumlah 11 SMK, dengan rincian 3 SMK Negeri dan 8 SMK Swasta. Berikut ini daftar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta se-Kota Pekalongan.

Tabel 3.1
Populasi Konselor Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Swasta
Kota Pekalongan

No	Nama sekolah	Status	Alamat	Jumlah Konselor
1.	SMK Negeri 1 Pekalongan	Negeri	Jl. Angkatan 66 No. 90, Kramatsari, Pekalongan 51118	3
2.	SMK Negeri 2 Pekalongan	Negeri	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 29, Kramatsari, Pekalongan 51118	4
3	SMK Negeri 3 Pekalongan	Negeri	Jl. Perintis Kemerdekaan No.30, Kramatsari, Pekalongan 51118	6
4	SMK Muhammadiyah Pekalongan	Swasta	Jalan AMD No.1 Pekalongan 51118	4
5	SMK Dwija Praja	Swasta	Jl. Sriwijaya No. 9, Bendan, Pekalongan	2

6	SMK Baitussalam	Swasta	Jl. Darma Bakti 3, Medono, Pekalongan 51111	3
7	SMK Perikanan Irma	Swasta	Jl. Sriwijaya No.16, Bendan, Pekalongan 51119	1
8	SMK Veteran Pekalongan	Swasta	Jl. Maninjau No.14, Keputran, Pekalongan 51128	1
9	SMK Syafi'i Akrom Pekalongan	Swasta	Jl. Pelita 1 (Perum Buaran Indah) No.322 Pekalongan 51133	5
10	SMK Diponegoro	Swasta	Jl. Raya Kertoharjo No. 1, Kertoharjo, Pekalongan	-
11	SMK Gatra Praja pekalongan	Swasta	Jl. Perintis Kemerdekaan No.9, Kraton Lor, Pekalongan 51145	2
Jumlah				32

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang langsung dikenai penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Menurut Sugiyono (2007: 62) teknik *nonprobability sampling* artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling insidental*, *sampling purposive*. *Sampling jenuh* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2007: 66).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMK Negeri maupun SMK Swasta kota Pekalongan yang berjumlah 11 sekolah, akan tetapi dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel adalah sebanyak 9 sekolah dengan rincian 3 SMK Negeri dan 6 SMK Swasta yaitu : SMK N 1 Pekalongan, SMK N 2 Pekalongan, SMK N 3 Pekalongan, SMK Muhammadiyah Pekalongan, SMK Gatra Praja

Pekalongan, SMK Veteran Pekalongan, SMK Baitussalam Pekalongan, SMK Syafi'i Akrom Pekalongan dan SMK Perikanan Irma Pekalongan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terdapat sekolah yang tidak terdapat subyek penelitian dalam arti konselor, dan juga terdapat sekolah yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian terdapat 30 konselor di Kota Pekalongan.

3.4 Metode pengumpulan data dan Instrumen Penelitian

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena dengan pengumpulan data akan diperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan reliabel. Ada banyak metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, antara lain wawancara, angket, observasi, tes, dokumentasi, skala psikologi, dan sebagainya. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkap variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap yaitu faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Berdasarkan hal di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket. Metode angket adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang telah diketahuinya. Nazir (2003: 203) mengemukakan bahwa “angket atau kuesioner

adalah sejumlah pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis.”

Peneliti menggunakan angket karena angket merupakan salah satu alat pengumpul data yang tepat dan sesuai dalam mengungkap atau memperoleh data mengenai keadaan dilapangan. Ada bermacam-macam bentuk dan jenis angket, menurut Sugiyono (2008: 143) bahwa angket digolongkan menjadi dua, yaitu angket yang terstruktur (tertutup) dan angket tidak berstruktur (terbuka). Yang dimaksud angket terstruktur atau tertutup adalah angket yang memiliki sifat tegas dan konkrit, dengan pertanyaan yang terbatas sehingga responden hanya memberi cek atau silang pada jawaban tersebut. Sedangkan yang dimaksud angket tak berstruktur atau terbuka adalah angket yang pertanyaan-pertanyaannya masih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi responden untuk menambahkan jawaban yang belum lengkap dalam pertanyaan tersebut.

Menurut Arikunto (2006: 152) ada beberapa keuntungan menggunakan angket yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memerlukan rnya peneliti
- b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden
- c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing, dan menurut waktu senggang responden
- d. Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-malu menjawab
- e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama.

Arikunto (2006: 153) mengemukakan bahwa selain keuntungan, ada juga kelemahan dari penggunaan angket yaitu:

- a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewat tidak dijawab, padahal sukar diulangi diberikan kembali padanya.
- b. Seringkali sukar dicari validitasnya
- c. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang betul atau tidak jujur
- d. Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos
- e. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat.

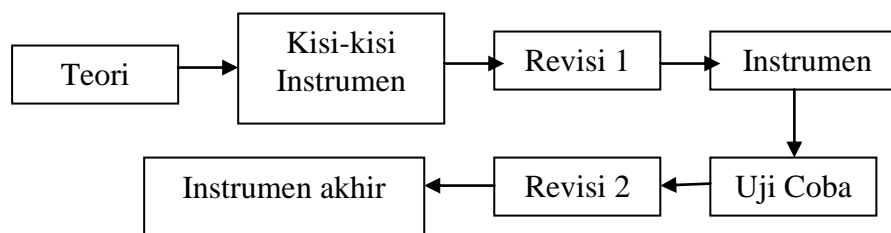
Anggapan yang dipegang peneliti dalam metode angket, yaitu (a) bahwa subyek adalah orang yang paling mengetahui dirinya sendiri, (b) bahwa apa yang diyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, (c) bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti.

Untuk mengatasi kelemahan angket maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti memberikan langsung angket kepada konselor
- b. Pengisian angket dilakukan secara bersama dengan ditunggu oleh peneliti
- c. Responden diberikan batas waktu tertentu dan pengisian angket yang dinilai peneliti cukup senggang dalam mengisi angket

3.4.2 Instrumen Penelitian

Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2
Langkah-langkah Penyusunan Instrumen

Setelah mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian, selanjutnya adalah membahas mengenai kisi-kisi instrumen. Setelah menyusun kisi-kisi instrumen, maka dilanjutkan dengan penyusunan instrumen angket secara utuh beserta lembar jawabnya.

Kisi-kisi instrumen dikembangkan berdasarkan pedoman mengenai faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang mencakup faktor internal dan faktor eksternal, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen
Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	Item	
				+	-
Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan bimbingan kelompok	Internal	a. Latarbelakang pendidikan konselor	a. Penyelenggara Bimbingan dan konseling sekolah harus berpendidikan S1 Bimbingan dan Konseling		
		b. Kompetensi kepribadian	a. Beragama, konsisten, dan toleransi terhadap pemeluk agama	1, 2	3
			b. mampu menjadi teladan bagi anggota kelompok dan bersikap demokratis	4, 5	6, 7
			c. berpenampilan menarik dan menyenangkan serta menampilkan tindakan yang cerdas selama kegiatan bimbingan kelompok	8, 10	9, 11
c. Kompetensi sosial	a. Bekerjasama	12, 13	14, 15		

			dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat kerja		
			b. Menumbuhkan tenggang rasa antar anggota kelompok	16, 17	18, 19
			c. Memiliki hubungan antar personal yang hangat	22, 23	20, 21
		d. Kompetensi profesional	a. menggunakan hasil assesmen dalam pelayanan bimbingan kelompok	24, 25	26, 27
			b. mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan kelompok	28, 29, 30	31, 33, 32
			c. menyusun dan merancang program bimbingan kelompok sesuai dengan volume kegiatan bimbingan kelompok	34, 36 , 38, 40	35, 37, 39, 41
			d. melakukan evaluasi proses pelayanan bimbingan kelompok	42, 45	43, 44
	Eksternal	a. Beban tugas konselor	a. Jumlah siswa yang di bimbing disekolah,	46	47
			b. Tugas tambahan yang diampu selain sebagai konselor sekolah,	48, 50	49
			c. Kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan bimbingan konseling	51, 52 , 55, 56 , 57, 58	53, 54
		b. Kepala Sekolah	a. memberi kemudahan terlaksananya program bimbingan	59	60

			kelompok		
			b. melakukan pengawasan	61	62
			c. menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelayanan bimbingan kelompok	64	63
		c. Guru mata pelajaran	a. memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan kelompok	65, 67	66, 68
			b. memberi motivasi kepada siswa untuk mengikuti bimbingan kelompok	69	70
		d. Wali Kelas	a. memberi informasi kepada siswa tentang layanan bimbingan kelompok	71, 73, 74	72
			b. mengirimkan referal siswa yang membutuhkan penanganan khusus dari konselor	77	75, 76
		f. Sarana dan prasarana	a. Alat pengumpul data	79 80	78, 81
			b. Alat penyimpan data	82, 84	83, 85
			c. Perlengkapan teknis dan non-teknis	86, 88 , 89, 90, 92 , 93	87, 91

Responden dapat memilih lima alternatif jawaban yang tersedia, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), KS (Kurang Sesuai) TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat

Tidak Sesuai). Setiap jenis respon mendapat nilai sesuai dengan arah pernyataan yang bersangkutan, antara lain:

Tabel 3.3
Penskoran Kategori Jawaban

Arah dari pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Positif	5	4	3	2	1
Negatif	1	2	3	4	5

3.5 Validitas, Reliabilitas, dan Uji Coba Instrumen

3.5.1 Validitas

Untuk mendapatkan alat pengumpulan data yang baik termasuk angket maka perlu dilakukan perhitungan Validitas dan Reliabilitas terhadap angket. Uji coba dilakukan pada 17 konselor yang tidak termasuk dalam sampel, yaitu konselor di SMK Kabupaten Pekalongan. Anggapan yang dipegang peneliti dalam melaksanakan uji coba di kabupaten pekalongan yaitu (a) karena hampir semua subyek dalam populasi menjadi sampel penelitian sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi uji coba (b) karakteristik daerah dari kota pekalongan dan kabupaten pekalongan relatif sama.

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2001: 5). Validitas menurut Arikunto (2006: 168) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan peneliti atau dapat mengungkapkan variabel yang diteliti secara tepat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk karena item-item (butir-butir) dalam instrumen penelitian dijabarkan berdasarkan bangunan teori yang telah ada. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: menganalisis suatu konstruk, memberi penilaian apakah bagian-bagian itu memang logis untuk disatukan menjadi skala mengukur konstruk dan menghubungkan konstruk yang sedang diamati dengan konstruk yang lainnya. Untuk menguji validitas dari masing-masing item menggunakan rumus *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- N : Jumlah Subjek
- $\sum X$: Jumlah Skor Item
- $\sum Y$: Jumlah Skor Total
- $\sum XY$: Jumlah Perkalian antara skor Item dengan skor total.
- $\sum X^2$: Jumlah Skor Item Kuadrat
- $\sum Y^2$: Jumlah Skor Total Kuadrat
- r_{xy} : Koefisien korelasi antara X dengan Y
(Suharsimi Arikunto, 2006 : 107).

Validitas instrumen dapat diketahui setelah dilakukan ujicoba dilapangan. Ujicoba instrumen dilakukan terhadap 17 konselor di luar sampel penelitian. “Validitas instrumen berdasarkan taraf signifikansi 5% karena pada umumnya untuk penelitian ilmu-ilmu sosial dan pendidikan menggunakan taraf signifikansi 5% sudah cukup tinggi sehingga memenuhi persyaratan untuk menarik generalisasi” (Sudjana, 2001: 80).

3.5.2 Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten, bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Azwar, 2001: 5). Sedangkan untuk mengukur reliabelitas angket yang digunakan yaitu Alpha, dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(\frac{\sum ab^2}{\sum at^2} \right)$$

Dimana :

$$\sum ab^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$

$$\sum at^2 = \frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}}{N}$$

Keterangan :

- R_{11} = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya butir angket
- $\sum ab^2$ = jumlah varians butir
- $\sum at^2$ = varians total

3.5.3 Hasil Uji Coba Instrumen

3.5.3.1 Uji Validitas Instrumen Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 93 item pernyataan. Setelah diujicobakan kepada 17 responden dan dianalisis terdapat 14 item yang tidak valid yaitu item nomor 13, 21, 22, 26, 30, 36, 40, 51, 56, 67, 74, 81, 88, dan 92 karena koefisiensi korelasi dari 14 item tersebut lebih kecil dari $r_{tabel} = 0,482$ untuk $\alpha = 5\%$ dengan $N = 17$. Selanjutnya untuk keperluan penelitian, item-item yang tidak valid dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian karena telah terwakili oleh item yang lain sesuai dengan indikator

dalam instrumen. Jadi instrumen faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah 79 item. Hasil dari perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran (6)

3.5.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen Faktor Determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha terdapat 17 responden, angket faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok dinyatakan reliabel karena $r_{11} > r_{tabel}$ dengan nilai $r_{11} = 0,975$ dan $r_{tabel} = 0,487$. Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas dapat di lihat pada lampiran (7)

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah instrumen instrumen dibagikan kepada responden dan terkumpul jawaban, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Langkah awal untuk menganalisis data adalah melakukan tabulasi data. Tabulasi data dilakukan dengan cara memasukan skor jawaban responden pada komputer sehingga hasilnya akan mempermudah analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis distribusi frekuensi dan analisis faktor.

3.6.1 Analisis Distribusi Frekuensi

Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih dahulu secara benar agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban yang tepat dari permasalahan yang diajukan. Teknik analisis data pertama yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi.

Analisis distribusi frekuensi adalah menganalisis dengan melihat distribusi jawaban responden dalam jawaban kuesioner (angket) yang telah disebarakan pada saat penelitian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bahwa rentang skor dalam angket faktor determinan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah 1-5. Dengan rentang skor tersebut, maka penentuan kriteria faktor determinan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok, dapat diketahui melalui rumus deskriptif persentase sebagai berikut :

$$N = \frac{r}{i} \times 100\%$$

Keterangan :
 N = Persentase
 r = skor jawaban responden
 i = skor jawaban ideal

Berdasarkan rumus di atas maka dapat diketahui bahwa dalam menginterpretasikan tingkat determinan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok yang memiliki rentang skor 1-5, maka jumlah skor dari tiap responden ditransformasi kedalam bentuk persentase skor dengan cara membagi dengan skor idealnya dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya persentase skor tersebut dibandingkan dengan kriteria tingkat faktor determinan kemudian diperoleh kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kriteria tingkat faktor determinan ketidaklaksanaan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut:

1) Data Maksimum

$$79 \times 5 = 395$$

2) Data Minimum

$$79 \times 1 = 79$$

$$3) \text{ Range} = 395 - 79 = 316$$

$$4) \text{ Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Range}}{\text{Banyakkelas}}$$

$$= \frac{316}{5}$$

$$= 63,2$$

$$5) \text{ Presentase skor maksimum} =$$

$$\% = \frac{r}{i} \times 100\%$$

$$= (5: 5) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$6) \text{ Presentase skor minimum} =$$

$$\% = \frac{r}{i} \times 100\%$$

$$= (1: 5) \times 100\%$$

$$= 20\%$$

$$7) \text{ Rentang presentase} =$$

$$R = X_t - X_r$$

Keterangan:

R : Rentang Persentase

X_t : Persentase Maksimum

X_r : Persentase Minimum (Sugiyono, 2006: 48)

$$100\% - 20\% = 80\%$$

$$8) \text{ Panjang Interval} =$$

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang} : \text{Banyak kriteria}$$

$$= 80\% : 5$$

$$= 16\%$$

Tabel 3.4
Kategori Tingkatan Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan
Bimbingan Kelompok

Skor	Interval	Kategori
331,8 ≤ 395	84% ≤ 100%	Sangat Tinggi
268,6 ≤ 331,8	68% ≤ 84%	Tinggi
205,4 ≤ 268,6	52% ≤ 68%	Sedang
142,2 ≤ 205,4	36% ≤ 52%	Rendah
79 ≤ 142,2	20% ≤ 36%	Sangat Rendah

3.6.2 Analisis Faktor

Setelah tabulasi data dan diperoleh hasil dari distribusi frekuensi, langkah selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis faktor dengan menggunakan bantuan program SPSS.

“Analisis faktor merupakan proses analisis yang mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal” (Santoso, 2012: 57).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka melalui analisis faktor dapat diketahui faktor-faktor manakah yang paling memberikan kontribusi besar dalam ketidakterlaksanaan bimbingan kelompok. Disesuaikan dengan instrumen penelitian, maka semakin besar koefisien korelasi suatu faktor yang ditunjukkan dari hasil analisis faktor, berarti semakin besar faktor tersebut menjadi determinan ketidakterlaksanaan bimbingan kelompok. Begitu juga sebaliknya jika koefisien

semakin kecil berarti semakin kecil faktor tersebut menjadi determinan ketidakterlaksanaan bimbingan kelompok.

Adapun rumus analisis faktor yang digunakan sebagai berikut :

$$X = A_1F_1 + A_2F_2 + \dots + A_kF_k + U$$

Keterangan:

X = Variabel

A_{1-k} = Konstanta Faktor

F_{1-k} = Faktor-faktor

U = Faktor-faktor unik.

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada analisis faktor yaitu sebagai berikut:

- (1) Besar KORELASI atau korelasi antar variabel independen harus cukup kuat, yaitu di atas 0,5.
- (2) Besar koefisien parsial, korelasi antar dua variabel justru harus kecil (ditunjukkan dengan ANTI-IMAGE CORRELATION pada SPSS).
- (3) Pengujian seluruh matrik korelasi (korelasi antar variabel) harus signifikan, yang ditunjukkan dengan BARTLETT TEST OF SPHERICITY ($< 0,05$ atau 5 %) atau MEASURE SAMPLING ADEQUACY ($> 0,5$).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis faktor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Menentukan variabel yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini analisis langsung dilakukan per indikator variabel. Karena analisis per sub variabel

tidak memenuhi asumsi pertama yang dipersyaratkan untuk dilakukan analisis faktor yaitu besar korelasi antar variabel independen hanya 0,5. Adapun analisis per indikator meliputi kompetensi kepribadian konselor, kompetensi sosial konselor, kompetensi profesional konselor, beban tugas konselor, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan sarana dan prasarana.

- (2) Menguji variabel dengan BARTLETT TEST OF SPHERICITY dan MEASURE SAMPLING ADEQUACY. Jika nilai BARTLETT TEST OF SPHERICITY kurang dari signifikansi 5% (0,05) dan MEASURE SAMPLING ADEQUACY lebih dari 0,5 maka analisis dapat dilanjutkan.
- (3) Melakukan Proses inti analisis faktor yaitu *Factoring* . (menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel yang telah lolos uji). Dalam menentukan jumlah faktor baru yang terbentuk dipengaruhi oleh nilai *Eigenvalues* yang mana harus lebih dari 1.
- (4) Melakukan *Factor Rotation* dengan metode *Varimax*. Tujuannya yaitu memperjelas posisi suatu variabel dalam faktor.

Nilai koefisien korelasi hasil analisis faktor kemudian di interpretasikan dalam bentuk kriteria yang diungkapkan oleh Cohen dan Manion dalam Sukardi (2008: 170) seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Kategori Interpretasi Skor Koefisien Korelasi

INTERVAL	KATEGORI
$0,85 < r \leq 1$	Tinggi
$0,65 < r \leq 0,85$	Cukup Tinggi
$0,35 < r \leq 0,65$	Sedang
$0,20 < r \leq 0,35$	Lemah

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan diperjelas dengan deskripsi kualitatif.

Sesuai dengan kajian teori bahwa faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok dikaji berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor tersebut yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan dijelaskan oleh masing-masing indikator.

4.1 Hasil Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) mengetahui faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, 2) mengetahui komponen dari faktor internal yang paling berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, 3) mengetahui komponen dari faktor eksternal yang paling berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Berikut pemaparan dari hasil penelitian :

4.1.1 Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menentukan indikator yang paling berpengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal peneliti menggunakan bantuan analisis faktor. Output data hasil analisis faktor dapat dilihat pada lampiran (12).

Sebelum melakukan analisis faktor ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, asumsi pertama yang harus dipenuhi adalah besar korelasi antar variabel yang ditunjukkan oleh nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) harus signifikan, yaitu di atas 0,5. Berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen diperoleh nilai KMO 0,838, oleh karena itu, dapat melangkah pada analisis berikutnya. Selain nilai KMO, nilai *Bartlett's Test of Sphericity* harus signifikan, yaitu kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan dalam penelitian. Taraf signifikansi yang ditentukan oleh peneliti yaitu 5%. Oleh karena itu, nilai *Bartlett's Test of Sphericity* harus kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Bartlett's Test of Sphericity* sebesar 0,000. Oleh karena itu, dapat melangkah pada tahap analisis berikutnya.

Setelah memenuhi syarat nilai KMO dan *Bartlett's Test of Sphericity*, asumsi yang harus dipenuhi lainnya adalah besar koefisien korelasi antar dua variabel harus kecil, yang ditunjukkan dengan dengan nilai *Anti-Image Correlation* pada SPSS. Menurut Sukardi (2008:170) “nilai koefisien korelasi 0,20-0,35 menunjukkan hubungan dua variabel yang lemah.”

Jika nilai KMO, *Bartlett's Test of Sphericity* dan *Anti-Image Correlation* sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya dilihat nilai MSA (*Measure of Sampling Adequacy*) di atas 0,5 yang mana menunjukkan korelasi signifikan. Hasil

analisis yang menunjukkan nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dapat dijelaskan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) Per Indikator Variabel

NO	FAKTOR	KOEFISIEN KORELASI
1	Kompetensi Kepribadian	0,777
2	Kompetensi Sosial	0,844
3	Kompetensi Professional	0,884
4	Beban Tugas Konselor	0,827
5	Kepala Sekolah	0,808
6	Guru Mata Pelajaran	0,818
7	Wali Kelas	0,895
8	Sarana dan Prasarana	0,818

Sesuai dengan tabel 4.1 di atas, maka semua faktor tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor.

Langkah selanjutnya adalah *factoring* dan *rotation*. *Factoring* dilakukan untuk mengelompokan indikator variabel kedalam faktor tertentu (pembentukan faktor). Selanjutnya untuk memperjelas kedudukan dalam faktor dilakukan *rotation*.

Berdasarkan tahap *factoring* diperoleh nilai *Communalities* (Jumlah varians dari suatu variabel mula-mula dijelaskan oleh faktor yang ada) seperti tertera pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Nilai *Communalities* Per Indikator Variabel

No	Faktor	Nilai <i>Communalities</i>	Keterangan
1	Kompetensi Kepribadian	0,609	60,9% varians kompetensi kepribadian dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
2	Kompetensi Sosial	0,642	64,2% varians kompetensi sosial dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
3	Kompetensi Professional	0,667	66,7% varians kompetensi professional dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
4	Beban Tugas Konselor	0,622	62,2% varians beban tugas konselor dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
5	Kepala Sekolah	0,612	61,2% varians kepala sekolah dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
6	Guru Mata Pelajaran	0,368	36,8% varians Guru mata Pelajaran dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
7	Wali Kelas	0,377	37,7% varians wali kelas dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.
8	Sarana dan Prasarana	0,601	60,1% varians sarana dan prasarana dapat dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk.

Setelah mengetahui nilai *communalities*, maka proses selanjutnya adalah menentukan banyaknya faktor baru yang terbentuk. Oleh karena itu, perlu diperhatikan nilai *eigenvalues* yang mana harus di atas 1. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh dua nilai *eigenvalues* yang di atas 1, yaitu: 5.178, dan 1.161. Dengan demikian faktor baru yang terbentuk juga ada dua.

Setelah melakukan proses *factoring* sehingga terbentuk dua kelompok faktor, maka dapat dilanjutkan dengan proses *rotation*. Tujuannya yaitu mengetahui kejelasan mengenai kedudukan suatu komponen dalam faktor yang baru terbentuk. Berdasarkan proses *rotation*, maka diperoleh dua kelompok faktor baru, seperti disebutkan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Pembentukan Faktor Per Indikator Variabel

FAKTOR	KOMPONEN FAKTOR	KOEFISIEN KORELASI
I	1. Kompetensi Kepribadian	0,759
	2. Kompetensi Sosial	0,783
	3. Kompetensi Profesional	0,816
	4. Beban Tugas Konselor	0,769
	5. Kepala Sekolah	0,760
	6. Guru Mata pelajaran	0,589
	7. Wali Kelas	0,612
II	1. Sarana dan Prasarana	0,742

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan analisis faktor terhadap delapan indikator variabel, maka terbentuk dua kelompok faktor. Dua kelompok faktor tersebut sudah tepat dalam membentuk kelompok faktor. Hal ini dapat dilihat pada tabel *Component Transformation Matrix* hasil analisis faktor yang mana koefisien korelasi tertinggi berada tepat pada kolom komponennya.

Pembentukan kelompok faktor tersebut hanya sebagian dari hasil analisis faktor. Penggunaannya dalam penelitian ini hanya sebatas untuk mengetahui dari delapan indikator variabel jika dilakukan analisis faktor akan mengelompok dalam dua komponen. Berdasarkan hasil analisis di atas masing-masing faktor

mempunyai kontribusi yang beragam sebagai determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Berikut penjelasan dari tiap indikator :

4.1.1.1 Kompetensi Kepribadian

Sesuai dengan kajian teori kompetensi kepribadian menjadi salah satu faktor dari ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok setelah dilakukan analisis faktor diperoleh hasil bahwa kompetensi kepribadian memperoleh nilai koefisien korelasi 0,759 dengan kriteria korelasi cukup tinggi.

4.1.1.2 Kompetensi Sosial

Selain kompetensi kepribadian, kompetensi sosial juga menjadi salah satu faktor dari ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah misalkan dari kurangnya ketrampilan sosial konselor untuk membangun kerjasama dengan personil sekolah yang lain serta kurang mampunya konselor untuk dapat menumbuhkan minat siswa untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Setelah dilakukan analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,783 dengan kriteria korelasi cukup tinggi.

4.1.1.3 Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional juga berpengaruh dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok salah satunya dengan melihat apakah konselor menggunakan hasil assesmen dalam pelayanan bimbingan kelompok, setelah dilakukan analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,816 dengan kriteria korelasi cukup tinggi.

4.1.1.4 Beban Tugas Konselor

Beban tugas konselor menjadi hal yang berpengaruh pula dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, misalnya dikarenakan masih tidak seimbang jumlah konselor di sekolah dengan jumlah siswa yang dibimbing, setelah dilakukan analisis diperoleh hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,769 dengan kriteria korelasi cukup tinggi.

4.1.1.5 Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah pihak yang bewenang dalam menetapkan kebijakan di sekolah sehingga dapat berpengaruh dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, setelah dilakukan analisis diperoleh hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,760 dengan kriteria korelasi cukup tinggi.

4.1.1.6 Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran dianggap berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok karena jika dibandingkan dengan konselor jumlah jam tatap muka guru mata pelajaran dengan siswa lebih banyak sehingga diharapkan dapat membantu konselor untuk mengkomunikasikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kepada siswa. Setelah dianalisis diperoleh hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,589 dengan kriteria korelasi sedang.

4.1.1.7 Wali Kelas

Wali kelas berpengaruh dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok karena wali kelas adalah pihak yang bertanggung jawab atas keadaan suatu kelas yang diampunya. Wali kelas dapat membantu dengan cara melaporkan data siswa yang membutuhkan penanganan khusus dari konselor. Setelah

dilakukan analisis diperoleh hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,612 dengan kriteria korelasi sedang.

4.1.1.8 Sarana dan Prasarana

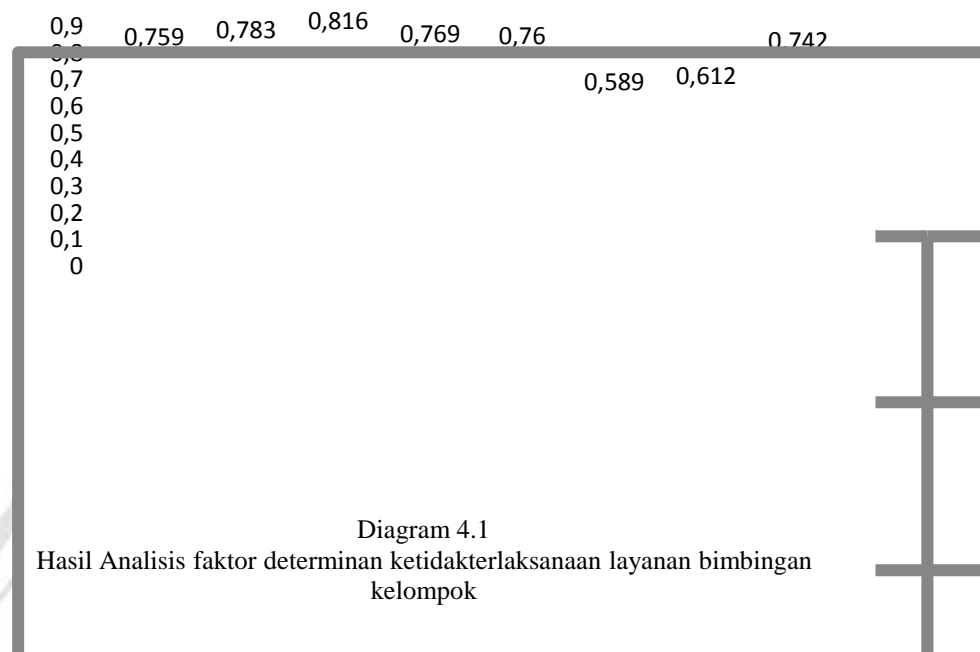
Sarana dan prasarana adalah bagian integral yang menunjang dari pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling secara umum sehingga sarana dan prasarana dinilai berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah. Setelah dianalisis diperoleh hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,742 dengan kriteria korelasi cukup tinggi.

Berikut ini akan disajikan tabel ringkasan hasil analisis faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se Kota Pekalongan.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Faktor Determinan
Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

No	Komponen	Koefisien Korelasi	Kriteria
1	Kompetensi kepribadian	0,759	Cukup Tinggi
2	Kompetensi sosial	0,783	Cukup Tinggi
3	Kompetensi profesional	0,816	Cukup Tinggi
4	Beban tugas konselor	0,769	Cukup Tinggi
5	Kepala sekolah	0,760	Cukup Tinggi
6	Guru mata pelajaran	0,589	Sedang
7	Wali kelas	0,612	Sedang
8	Sarana dan prasarana	0,742	Cukup Tinggi

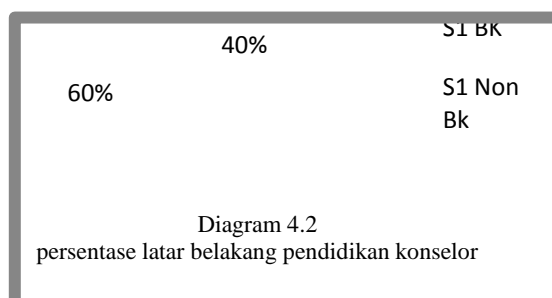
Dari data di atas dapat diperjelas dengan diagram berikut ini :



Selain dari penjelasan indikator di atas, berdasarkan hasil pengisian angket konselor diperoleh juga data mengenai latar belakang pendidikan konselor yang mana hasil dari latar belakang konselor di SMK Se-Kota Pekalongan adalah 12 orang konselor berlatar belakang pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, dan 18 orang konselor berlatar belakang pendidikan bukan Bimbingan dan Konseling. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Data Latar Belakang Pendidikan Konselor
di SMK Se-Kota Pekalongan

Kategori	Jumlah Konselor	Persentase
BK	12	40%
Non BK	18	60%



Sesuai dengan data dari tabel, dapat dilihat bahwa tidak semua konselor di SMK Se-Kota Pekalongan adalah lulusan dari jurusan S-1 Bimbingan dan Konseling, sedangkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang konselor adalah seorang sarjana bimbingan dan konseling. Dapat dilihat bahwa konselor yang berlatar belakang S1 bimbingan dan konseling hanya berjumlah 12 orang atau hanya 40% dari jumlah sampel, sedangkan konselor yang berlatar belakang dari luar jurusan bimbingan dan konseling berjumlah 18 orang atau 60% dari jumlah sampel. Adapun data mengenai latar belakang pendidikan konselor dapat dilihat pada lampiran (8).

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal lebih berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan dibandingkan dengan faktor eksternal.

4.1.2 Faktor Internal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Setelah mengetahui hasil dari faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, akan di sajikan data hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri

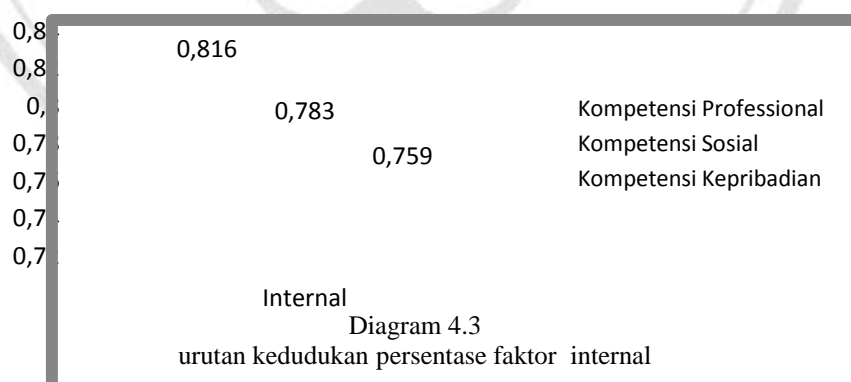
konselor sebagai penyelenggara kegiatan bimbingan kelompok di sekolah. Berikut pemaparan hasil analisis data pada faktor internal :

Berdasarkan hasil analisis faktor, seluruh komponen dari faktor internal mendapatkan hasil nilai koefisien korelasi dengan kategori cukup tinggi. Adapun urutan kedudukan masing-masing komponen akan dijelaskan dalam tabel 4.6

Tabel 4.6
Urutan Kedudukan Faktor Internal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan kelompok

Sub Variabel	Komponen	Koefisien Korelasi	Persentase	Kategori
Internal	Kompetensi Profesional	0,816	81,6%	Cukup Tinggi
	Kompetensi Sosial	0,783	78,3%	Cukup Tinggi
	Kompetensi Kepribadian	0,75,9	75,9%	Cukup Tinggi

Data dari tabel 4.6 di atas dapat diperjelas dengan diagram berikut ini:



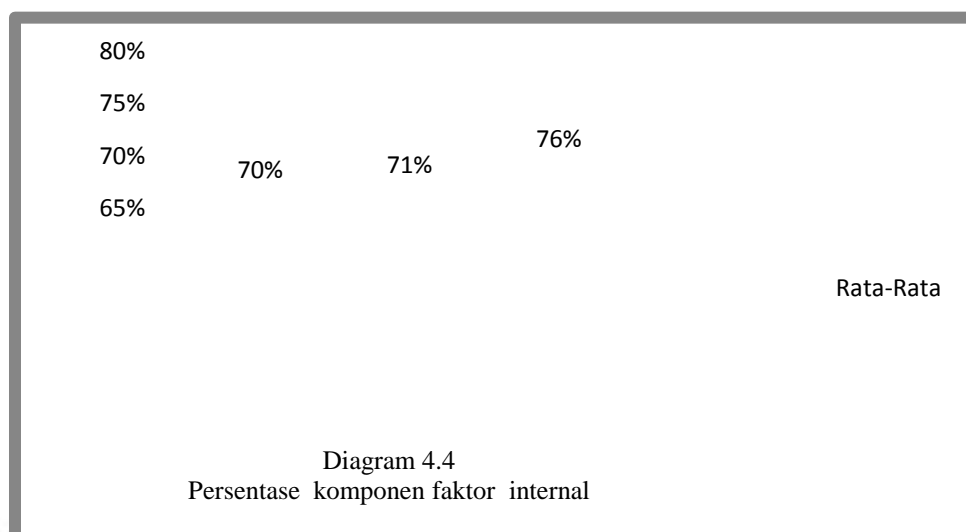
Berdasarkan dari data di atas diperoleh hasil bahwa dari faktor internal kompetensi profesional adalah yang berpengaruh paling tinggi terhadap

ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu sebanyak 81,6% dengan kategori cukup tinggi.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil analisis deskriptif persentase yang menyebutkan bahwa secara umum seluruh komponen dari faktor internal memperoleh hasil dengan kategori tinggi. Namun kompetensi profesional adalah yang berpengaruh paling tinggi terhadap ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok yaitu sebanyak 76% dengan kategori tinggi. Tabel berikut ini adalah data dari hasil analisis deskriptif presentase dari faktor internal ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Deskriptif Persetase Faktor Internal

No	Komponen	Rata-rata	Kriteria
1	Kompetensi kepribadian	70%	Tinggi
2	Kompetensi Sosial	71%	Tinggi
3	Kompetensi Profesional	76%	Tinggi



Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan untuk masing masing komponen dari faktor internal sebagai berikut :

4.1.2.1 Kompetensi kepribadian

Indikator kompetensi kepribadian memperoleh rata-rata persentase 70% dengan kategori tinggi hal ini berarti indikator kompetensi kepribadian mempengaruhi konselor dengan kriteria tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah, hal ini dapat dikarenakan penguasaan konselor terhadap kompetensi kepribadian belum cukup baik.

4.1.2.2 Kompetensi Sosial

Sama seperti indikator kompetensi kepribadian, kompetensi sosial memperoleh rata-rata persentase 71% dengan kategori tinggi. Hal ini juga berarti bahwa kompetensi sosial belum dikuasai dengan baik oleh konselor sehingga berpengaruh tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

4.1.2.3 Kompetensi Profesional

Tidak jauh berbeda dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, kompetensi profesional juga memperoleh rata-rata persentase 76% dengan kategori tinggi. Hal ini berarti konselor sekolah juga belum menguasai kompetensi profesional dengan baik sehingga mempengaruhi konselor dengan kriteria tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Merujuk pada beberapa data yang telah disajikan di atas, maka sangat menunjang apabila dari faktor internal kompetensi profesional menjadi komponen yang paling berpengaruh dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok karena berhubungan pula dengan latar belakang pendidikan seperti yang sudah dijelaskan di awal. Latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan profesi konselor menjadikan konselor kurang mampu dalam penguasaan kompetensi profesional dan kurang berkompeten untuk menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari faktor internal kompetensi profesional berpengaruh paling tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan.

4.1.3 Faktor Eksternal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Setelah disajikan pemaparan hasil analisis mengenai faktor internal, berikutnya akan di sajikan data hasil analisis faktor eksternal. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri konselor sebagai penyelenggara kegiatan bimbingan kelompok di sekolah. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari faktor eksternal adalah: beban tugas konselor, kepala sekolah, guru mata

pelajaran, wali kelas, dan sarana prasarana. Berikut pemaparan hasil analisis data pada faktor eksternal:

Berdasarkan hasil analisis faktor, secara umum komponen dari faktor Eksternal mendapatkan hasil nilai koefisien korelasi beragam. Adapun urutan kedudukan masing-masing komponen akan dijelaskan dalam tabel 4.8

Tabel 4.8
Urutan Kedudukan Faktor Eksternal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan kelompok

Sub Variabel	Komponen	Koefisien Korelasi	Persentase	Kategori
Eksternal	Beban tugas konselor	0,769	76,9%	Cukup Tinggi
	Kepala Sekolah	0,760	76%	Cukup Tinggi
	Sarana Prasarana	0,742	74,2%	Cukup Tinggi
	Wali Kelas	0,612	61,2%	Sedang
	Guru Mata Pelajaran	0,589	58,9%	Sedang

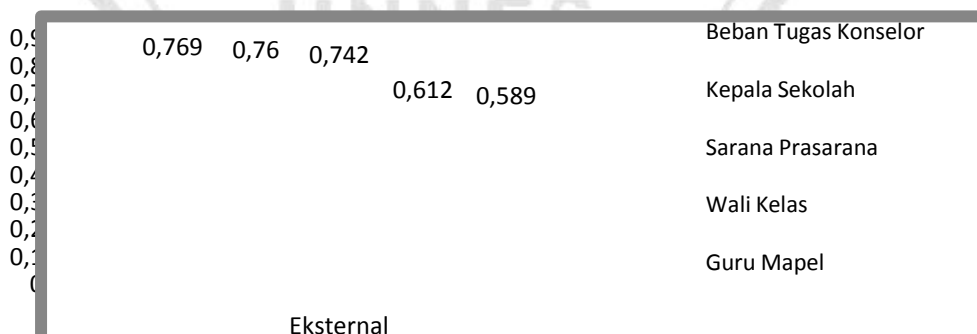


Diagram 4.5
urutan kedudukan persentase faktor eksternal

Berdasarkan dari data di atas diperoleh hasil bahwa dari faktor eksternal beban tugas konselor adalah yang berpengaruh paling tinggi terhadap ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu sebanyak 76,9% dengan kategori cukup tinggi.

Selaras dengan faktor internal, dalam faktor eksternal juga diperkuat dengan hasil analisis deskriptif persentase yang menyebutkan bahwa beban tugas konselor menjadi komponen yang paling berpengaruh dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu dengan memperoleh hasil rata-rata persentase sebesar 73% dengan kriteria tinggi. Berikut ini adalah hasil dari analisis deskriptif persentase dari faktor eksternal ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Deskriptif Persentase Faktor Eksternal

No	Indikator	Rata-rata	Kriteria
1	Beban tugas konselor	73%	Tinggi
2	Kepala Sekolah	70%	Tinggi
3	Guru mata pelajaran	63%	Sedang
4	Wali Kelas	67%	Sedang
5	Sarana Prasarana	72%	Tinggi

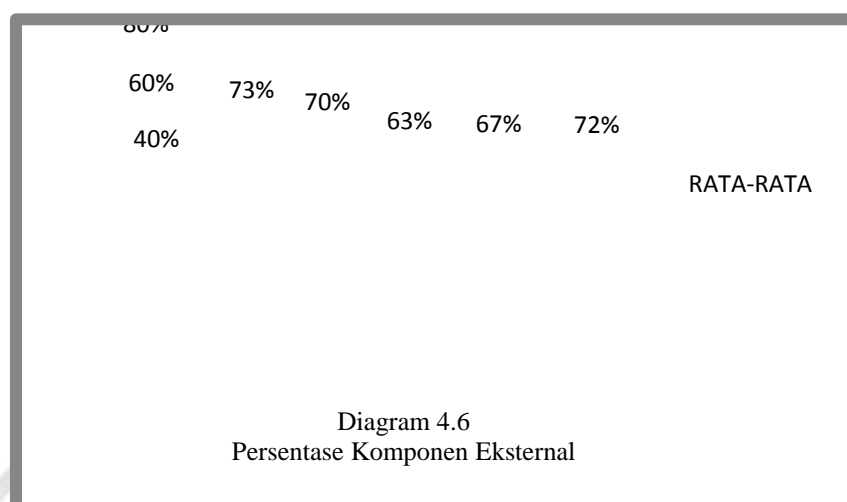


Diagram 4.6
Persentase Komponen Eksternal

Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.6 dapat dijelaskan bahwa masing-masing indikator dalam faktor eksternal mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing konselor terkait dengan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah. Terlihat pada indikator tertinggi yang berpengaruh terhadap ketidaklaksanaan bimbingan kelompok di sekolah adalah beban tugas konselor dengan persentase 73% dengan kategori tinggi dan indikator yang paling rendah tingkat pengaruhnya terhadap konselor dalam ketidaklaksanaan bimbingan kelompok adalah indikator guru mata pelajaran dengan persentase 63% kategori sedang. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing indikator :

4.1.3.1 Beban Tugas Konselor

Indikator beban tugas konselor memperoleh persentase tertinggi, yaitu sejumlah 73% yang berarti mempengaruhi konselor paling tinggi dari indikator lainnya dalam ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah.

4.1.3.2 Kepala Sekolah

Indikator kepala sekolah memperoleh persentase 70% dengan kategori tinggi sehingga indikator ini dapat dikatakan mempengaruhi konselor dengan kategori tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

4.1.3.3 Guru Mata Pelajaran

Indikator guru mata pelajaran memperoleh persentase 63% dengan kategori sedang. Indikator ini dapat dikatakan mempengaruhi konselor dengan kategori sedang dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

4.1.3.4 Wali Kelas

Indikator wali kelas memperoleh persentase 63% dengan kategori sedang sehingga indikator ini dapat dikatakan mempengaruhi konselor dengan kategori sedang dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

4.1.3.5 Sarana dan Prasarana

Indikator sarana dan prasarana memperoleh persentase 72% dengan kategori tinggi sehingga indikator ini dapat dikatakan mempengaruhi konselor dengan kategori tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor beban tugas konselor menjadi faktor yang paling tinggi mempengaruhi konselor ditinjau dari faktor eksternal dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan.

4.2 Pembahasan

Setelah menjabarkan tentang hasil penelitian, selanjutnya peneliti akan membahas secara rinci tentang hasil penelitian faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan yang di kaitkan dengan landasan teori.

4.2.1 Faktor Determinan Ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMK Se-Kota Pekalongan

Faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal adalah : latar belakang pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal adalah : beban tugas konselor, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan sarana prasarana.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konselor sebagai petugas bimbingan dan konseling di sekolah yang menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri konselor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lain dalam penelitian ini karena tidak dapat berjalan layanan bimbingan kelompok tanpa pelaksana itu sendiri yaitu konselor, namun juga konselor tidak dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait yang menunjang pelaksanaan dari layanan bimbingan kelompok.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dengan membandingkan rata-rata persentase dan melihat nilai koefisien korelasi pada masing-masing faktor, seluruh indikator dari faktor internal memperoleh hasil koefisien korelasi dengan kategori cukup tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, sedangkan untuk seluruh indikator dari faktor eksternal memperoleh hasil koefisien korelasi yang bervariasi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok, ada yang memperoleh hasil dengan kategori cukup tinggi ada pula yang memperoleh hasil dengan kategori sedang. Dengan demikian meskipun tidak menunjukkan perbedaan hasil yang cukup tinggi tetapi dapat disimpulkan bahwa faktor internal lebih berpengaruh terhadap ketidakterlaksanaan bimbingan kelompok dibandingkan dengan faktor eksternalnya.

Faktor internal yang merupakan faktor dari dalam diri konselor sebagai pelaksana kegiatan layanan bimbingan kelompok menjadi dominan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah, faktor internal lebih berpengaruh karena dilihat dari latar belakang pendidikan konselor tidak semuanya berasal dari program studi bimbingan dan konseling sehingga tidak relevan dengan profesi konselor. Tentu ini berakibat pada penguasaan kompetensi konselor yang sudah dipersyaratkan sebagai kualifikasi dan harus dipenuhi tidak begitu optimal. Sehingga konselor menjadi kurang berkompeten dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada khususnya.

4.2.2 Faktor Internal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konselor sebagai penyelenggara dan pelaksana layanan bimbingan kelompok di sekolah. Sesuai dengan hasil penelitian faktor internal lebih berpengaruh dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah dibandingkan dengan faktor eksternal, yang mana faktor internal terdiri dari latar belakang pendidikan konselor, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Setelah dilakukan analisis faktor pada masing-masing indikator, untuk faktor internal diperoleh hasil bahwa kompetensi profesional merupakan indikator tertinggi yang mempengaruhi ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah.

4.2.2.1 Latar Belakang Pendidikan Konselor

Kategori pertama yang termasuk dalam faktor internal adalah latar belakang pendidikan konselor. Konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional dalam bimbingan dan konseling yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hikamawati (2011: 43) konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik disuatu pendidikan.

Jadi, profesi konselor sekolah seharusnya adalah seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi bidang bimbingan dan konseling. Hal ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan bimbingan konseling dan tidak terjadi kesalahan dalam kinerja konselor karena latar belakang

pendidikan konselor berasal dari bidang yang sesuai. Kesesuaian latar belakang pendidikan berpengaruh baik dan akan terlihat dalam kinerja yang ditampilkan konselor di sekolah karena bekal pendidikan yang cukup dapat digunakan konselor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah. Namun, sebaliknya jika konselor sekolah diampu oleh pendidik yang berlatar belakang non bimbingan dan konseling maka dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik. Selain latar belakang pendidikan yang tidak relevan juga tidak memiliki bekal ilmu yang cukup untuk membantu pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sehingga mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan bimbingan dan konseling.

Merujuk pada hasil penelitian di lapangan, masih cukup banyak konselor di SMK yang berlatar belakang non bimbingan konseling yaitu sejumlah 60% dari jumlah sampel sehingga berpengaruh pada ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Keadaan di lapangan tidak selaras dengan pendapat Prayitno (2004: 6) yang menyatakan konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan konseling.

Profesi konselor telah diakui secara undang-undang dan merupakan profesi yang profesional sehingga untuk dapat melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah harus dilakukan oleh sarjana bidang bimbingan dan konseling. Seorang konselor sekolah dituntut untuk memahami dengan baik standar kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki dan diaplikasikan dalam

melaksanakan tugasnya sebagai konselor sekolah. Konselor dengan latar belakang bimbingan konseling memiliki bekal dan kesiapan yang lebih baik untuk menunjang melaksanakan tugasnya sebagai konselor sekolah karena dalam pendidikan bimbingan dan konseling diajarkan tentang kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.

4.2.2.2 Kompetensi Kepribadian

Kategori kedua yang termasuk dalam faktor internal adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berpengaruh dalam penelitian ini karena seorang konselor dengan menguasai kompetensi kepribadian, dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat menampilkan kepribadian yang baik sehingga siswa dapat memberikan penilaian langsung terhadap kepribadian yang ditampilkan oleh konselor. Sesuai dengan pendapat Sagala (2009: 33) kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang.

Kompetensi kepribadian memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik terutama dalam membentuk kepribadian peserta didik karena mereka belajar langsung dari figur seorang konselor di sekolah. Mulyasa (2008: 117) menyatakan bahwa dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

Berdasarkan hasil penelitian ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian berpengaruh cukup tinggi dengan ditunjukkan nilai koefisien korelasi 75,9%. Maka dapat dijelaskan bahwa penguasaan konselor dalam kompetensi kepribadian masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman tentang standar kompetensi yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah. Bagian dari kompetensi kepribadian yang juga turut andil dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat dilihat dalam konsistensi beragama, toleransi antar agama, serta sikap yang ditampilkan selama mengadakan layanan bimbingan kelompok.

4.2.2.3 Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang pendidik dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi sosial berpengaruh dalam penelitian ini karena dengan menguasai kompetensi sosial dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok konselor akan dapat dengan mudah untuk menciptakan dinamika kelompok, menumbuhkan tenggang rasa antar anggota kelompok, menjalin hubungan antar personal yang hangat, dan mampu melakukan kerjasama dengan baik. Dengan demikian, suasana yang terbangun dalam bimbingan kelompok akan menjadi

hidup dan menyenangkan sehingga akan mendorong minat siswa untuk terus memanfaatkan layanan bimbingan kelompok. Sesuai dengan salah satu tujuan dari bimbingan kelompok, yaitu mengembangkan ketrampilan sosial anggota kelompok dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian tentang ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok yang menunjukkan bahwa kompetensi sosial berpengaruh cukup tinggi dengan ditunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 78,3%. Maka dapat dijelaskan bahwa penguasaan konselor dalam kompetensi sosial masih tergolong rendah, kurangnya pemahaman tentang standar kompetensi yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah sehingga kompetensi sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaklaksanaan layanan bimbingan kelompok.

4.2.2.4 Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang pendidik yang mencakup penguasaan materi secara luas dan mendalam, kesadaran komitmen terhadap profesi serta penguasaan terhadap konsep dan praksis dalam bimbingan dan konseling.

Kompetensi profesional berpengaruh dalam penelitian ini karena dengan menguasai kompetensi profesional dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok konselor akan melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, menyusun dan merancang program bimbingan kelompok sesuai dengan volume kegiatan bimbingan kelompok, dan melakukan evaluasi serta *follow up* dari proses kegiatan bimbingan kelompok yang diselenggarakan. Konselor yang menguasai kompetensi profesional akan dapat menyadari

efektivitas dari layanan bimbingan kelompok karena interaksi antara konselor dengan siswa dalam format kelompok lebih memudahkan konselor untuk melayani kebutuhan siswa yang belum terpenuhi dalam layanan format klasikal. Mengingat volume kegiatan layanan bimbingan kelompok memiliki persentase paling tinggi jika dibandingkan dengan layanan lain dan beban tugas konselor di sekolah selain menjadi konselor sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok menunjukkan bahwa kompetensi profesional berpengaruh cukup tinggi dengan ditunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 81,6%. Maka dapat dijelaskan bahwa penguasaan konselor dalam kompetensi profesional masih tergolong rendah, kurangnya pemahaman tentang standar kompetensi yang harus dikuasai dan diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari latar belakang pendidikan konselor, dengan berasal dari latar belakang yang kurang relevan dengan bimbingan konseling dan kurang memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk melaksanakan tugas menjadikan konselor di sekolah menjadikan konselor kurang berkompeten dalam melaksanakan tugas, dan menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok.

4.2.3 Faktor Eksternal Determinan Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Setelah menjelaskan dari faktor internal faktor yang juga berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri konselor sebagai penyelenggara layanan bimbingan kelompok. Adapun yang termasuk dalam faktor

eksternal dalam penelitian ini adalah : beban tugas konselor, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, serta sarana dan prasarana. Setelah dilakukan analisis faktor terhadap masing-masing indikator, untuk faktor eksternal diperoleh hasil bahwa beban tugas konselor merupakan indikator tertinggi yang mempengaruhi ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok di sekolah.

4.2.3.1 *Beban Tugas Konselor*

Faktor eksternal ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang pertama adalah beban tugas konselor. Sesuai dengan pendapat Sukardi (2000: 62) karena kekhususan bentuk tugas dan tanggung jawab konselor sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban tugas atau penghargaan jam kerja guru pembimbing ditetapkan 36 jam/minggu. Penghargaan jam kerja konselor tersebut terbagi dalam penyusunan program, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil program. Faktor ini berpengaruh dalam penelitian karena dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seorang konselor dituntut untuk melakukan kegiatan penyusunan program bimbingan konseling, pelaksanaan program bimbingan konseling, evaluasi program bimbingan konseling dan bertanggung jawab atas program yang sudah dibuat kepada kepala sekolah.

Sering kali kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada konselor sehingga dalam menyelesaikan tugas utamanya sebagai konselor secara administrasi sering mengalami kendala dan kekurangan waktu. Ada juga di beberapa sekolah yang menganggap bimbingan konseling kurang begitu penting sehingga berdampak pada peniadaan jam tatap muka secara klasikal dengan siswa.

Ditambah dengan keadaan dilapangan yang menjelaskan bahwa jumlah siswa asuh dengan jumlah konselor di sekolah belum menunjukkan jumlah seimbang yang seharusnya untuk satu orang konselor mengampu 150 siswa asuh.

Berdasarkan hasil penelitian tentang ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang menunjukkan bahwa beban tugas konselor berpengaruh cukup tinggi dengan ditunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 76,9%. Maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata konselor di SMK belum memiliki keseimbangan waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan yang diamanatkan. Hambatan juga terjadi saat konselor harus melayanai sejumlah siswa asuh yang melebihi batas ideal untuk masing masing konselor dan kurangnya jam tatap muka dengan siswa karena peniadaan jam bimbingan konseling sehingga faktor beban tugas konselor berkontribusi tinggi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.

4.2.3.2 Kepala Sekolah

Indikator kepala sekolah berpengaruh dengan penelitian ini karena kepala sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Seorang kepala sekolah adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam program bimbingan dan konseling serta memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Kewenangan kepala sekolah dalam pengawasan pelaksanaan bimbingan dan konseling meliputi perencanaan program, pelaksanaan program, pelayanan bimbingan konseling, program administrasi sekolah, pengawasan pelaksanaan program bimbingan,

alokasi waktu pelaksanaan dan penyediaan fasilitas yang diperlukan. Pemahaman kepala sekolah tentang manfaat pelayanan bimbingan dan konseling bagi siswa asuh akan berdampak pada kebijakan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah tersebut. Pengalokasian waktu jam tatap muka dan peniadaan jam tatap muka dengan siswa juga bagian dari kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah kepada konselor.

Berdasarkan hasil penelitian tentang ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok yang menunjukkan bahwa kepala sekolah berpengaruh cukup tinggi dengan ditunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 76%. Maka dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah kurang kooperatif dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang manfaat pelayanan bimbingan kelompok untuk peserta didik sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang berpihak kepada konselor untuk melaksanakan tugasnya. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan guru yang sudah tersertifikasi mengajar selama 24 jam dalam satu minggu menjadikan kepala sekolah memberikan tugas kepada guru mata pelajaran lain yang sudah tersertifikasi merangkap menjadi konselor sekolah untuk memenuhi kekurangan jam mengajar. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja konselor yang tidak berasal dari bimbingan dan konseling, namun untuk memenuhi kekurangan jam mengajar merangkap menjadi konselor sekolah.

4.2.3.3 Guru Mata Pelajaran

Faktor berikutnya yang dinilai berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran

kaitannya dalam membantu konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok adalah memiliki peran dan kesempatan dalam interaksi langsung dengan siswa. Guru mata pelajaran memiliki waktu lebih banyak dibanding konselor untuk berinteraksi dengan siswa sehingga dapat membantu untuk memotivasi siswa agar memanfaatkan layanan bimbingan kelompok.

Berdasarkan hasil analisis keadaan dilapangan indikator guru mata pelajaran menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 58,9% dengan kategori sedang. Memang tidak semua guru mata pelajaran dapat kooperatif dan mau membantu konselor dalam memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Melihat aktifitas dan tugas pokok yang diampu guru mata pelajaran juga tidak dapat dikatakan sedikit terlebih pada saat menjelang ujian, guru mata pelajaran lebih fokus untuk menyelesaikan materi yang belum tersampaikan serta melatih siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian, dapat juga dikarenakan keterbatasan pengertian dan pemahaman dari masing-masing guru mata pelajaran tentang manfaat dari pelayanan bimbingan kelompok yang mengakibatkan guru mata pelajaran belum dapat kooperatif dengan konselor. Akan tetapi indikator guru mata pelajaran berpengaruh sedang dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok hal ini berarti peranan guru mata pelajaran dalam membantu konselor untuk dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok sudah cukup baik.

4.2.3.4 Wali Kelas

Indikator faktor eksternal selanjutnya adalah wali kelas yang dinilai berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Wali

kelas adalah orang yang bertanggung jawab dalam keadaan di suatu kelas, wali kelas berperan sebagai orang tua siswa di sekolah dan mempunyai peran yang positif dalam berinteraksi dengan siswa. Wali kelas dinilai dapat membantu konselor dalam memberikan informasi dan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok, dan membantu melaporkan keadaan siswa yang diasuhnya apabila membutuhkan penanganan khusus dari konselor sehingga memudahkan konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Bedasarkan hasil penelitian, wali kelas mendapatkan hasil berpengaruh sedang dengan menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 61,2%. hal ini berarti sudah cukup terjalin kerjasama yang baik antara konselor selaku petugas bimbingan konseling di sekolah dengan wali kelas karena tergolong kategori sedang kontribusinya dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Bagian dari indikator wali kelas yang juga turut andil dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat dilihat dalam informasi yang diberikan kepada siswa tentang pelayanan BK dan memberikan *referral* data siswa yang membutuhkan penanganan dari konselor sehingga memudahkan konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa.

4.2.3.5 Sarana dan Prasarana

Indikator terakhir dari faktor eksternal yang berkontribusi dalam ketidakterlaksanaan bimbingan kelompok adalah sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya tentu konselor membutuhkan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai dan terstandar faktor ini menunjang konselor dalam

melaksanakan tugasnya baik secara administratif maupun dalam praktik pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa asuh, konselor harus melakukan *need assesment* sehingga tepat dalam menentukan jenis layanan yang akan diberikan. Dalam bimbingan kelompok, konselor dapat menentukan jenis topik yang dianggap relevan dengan kebutuhan siswa. Untuk melakukan *need assement*, konselor harus menggunakan instrument yang sesuai dengan keadaan dan tugas perkembangan siswa sehingga layanan dapat tercapai dengan optimal. Setelah melakukan *need assement* dan penyusunan program konselor mengadminstrasikan secara rapi data-data tersebut agar dapat mempermudah saat dibutuhkan. Kaitannya dengan praktik layanan bimbingan kelompok, konselor membutuhkan ruangan yang memadai untuk dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator sarana dan prasarana berpengaruh cukup tinggi dengan menunjukkan angka korelasi koefisien sebesar 74,2% dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana dapat menjadi permasalahan yang seragam di semua sekolah karena dalam praktiknya di lapangan, sekolah yang sudah terstandar RSBI tidak terlihat adanya ruangan yang representatif untuk dapat digunakan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Sekolah masih belum terfasilitasi dengan baik, hal ini terlihat dengan tidak adanya ruang konsultasi, ruang khusus untuk konseling individu, ruang khusus untuk bimbingan kelompok, dan beberapa perabot perlengkapan yang menunjang. Semuanya itu adalah bagian integral dari aktifitas

pelayanan bimbingan dan konseling untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti sudah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan metode penelitian. Akan tetapi, peneliti masih merasa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut dapat dilihat pada instrumen penelitian karena hanya digunakan angket sebagai instrument utama padahal angket masih memiliki keterbatasan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Keterbatasan tersebut di antaranya karena adanya kecenderungan individu untuk menilai diri lebih baik atau lebih buruk dari kondisi sebenarnya dan tidak sesuai dengan keadaan dirinya, meskipun peneliti sudah berupaya menjelaskan kepada subyek untuk jujur dalam mengisi angket.

Kemudian keterbatasan lain adalah mengenai waktu dan perijinan dari pihak sekolah, yaitu pelaksanaan penelitian bersamaan dengan persiapan sekolah untuk ujian akhir semester (UAS).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa faktor determinan ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan faktor yang memiliki korelasi cukup kuat sebagai penyebab ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok. Berikut penjelasan secara rinci simpulan dari penelitian ini :

- 1) Faktor internal menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok.
- 2) Adapun untuk faktor internal yang terdiri dari : latar belakang konselor, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah kompetensi profesional dengan persentase rata-rata 76 % dan hasil koefisien korelasi cukup kuat yaitu 0,816.
- 3) Sedangkan untuk faktor eksternal yang terdiri dari : beban tugas konselor, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas dan sarana dan prasarana yang menjadi determinan dalam ketidakterlaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah beban tugas konselor dengan persentase rata-rata 73 % dan memiliki nilai koefisien korelasi cukup kuat yaitu 0,769.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat di sampaikan untuk konselor dan kepala sekolah di SMK Se-Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk konselor, diharapkan untuk berusaha meningkatkan penguasaan kompetensi konselor khususnya kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hal ini penting untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai konselor sekolah yang profesional. Dengan penguasaan kompetensi diharapkan konselor dapat menampilkan kinerja yang lebih baik sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari kepala sekolah dan rekan sesama pendidik, agar dapat terjalin kerjasama yang baik, selaras, dan tidak merugikan pihak manapun sehingga kebutuhan siswa sebagai *stake holder* yang harus dipenuhi dalam layanan bimbingan kelompok dapat dicapai.
- 2) Untuk kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memfasilitasi konselor dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, serta menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program BK dan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. 2005. *Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Standar Kompetensi Konselor
- Amti, Erman dan Marjohan. 1992. *Bimbingan dan Konseling*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- Arifin, Tajul. 2009. *Faktor-faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di Smk Ma'arif Nu Tirto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Azwar, S. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar Offset
- Azwar, S. 2001. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Azwar, S. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2010. *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Fenti, Hikmawati. 2011. *Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Press
- Kusdiarti. 2010. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Penyesuaian Diri Remaja Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Kelayan Panti Bina Remaja Wira Adi Karya Ungaran Tahun 2010*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Kusuma, Rais. 2008. *Keefektifan bimbingan kelompok dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial siswa kelas XI di Sma N 2 Ungaran pelajaran 2007/2008*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Masri, Singarimbun dan Sofiyon Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3S
- Mugiarso, Heru. DKK.2004. *Bimbingan dan Konseling*. Semarang : Unnes Press
- Mulyasa. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Mulyasa. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta :Ghalina Indonesia
- Panitia Konvensi Nasional ABKIN. 2011. *Konvensi Nasional XVII Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN)*. Pekanbaru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008*.
- PPRI No 74 Tahun 2008. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen*. Jakarta. CV Novindo Pustaka Mandiri
- Prayitno. 1995. *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil)*. UNP : Ghalia Indonesia.
- Prayitno. 2004. *Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok.L6-L7*. Padang : UNP
- Rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal*. 2007. Departemen Pendidikan Nasional
- Romlah, Tatiek. 2001. *Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok*. Malang : UNM Press
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Multivariat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2000. *Profesi Keguruan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sudjana. 2001. *Metoda Statistik*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukardi, dan Nila Kusumawati. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sukardi, Dewa Ketut. 2002. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta

- Sukardi, Dewa Ketut. 2003. *Manajemen Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Bandung : Alfabeta
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sukardi. 2010. *Metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryabrata, S. 2006. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang No 20 Tahun 2003*. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- UURI No. 14 Tahun 2005. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen*. Jakarta. CV Novindo Pustaka Mandiri
- Wibowo, Mungin Eddy. 2005. *Konseling Kelompok Perkembangan*. Semarang : Unnes Press
- Wingkel, WS.2006. *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*. Jakarta : PT Gramedia Widiarsana Indonesia.
- Yusuf, Syamsu dan Juntika Nur Ikhsan. 2005. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. PT REMAJA ROSDAKARYA

LAMPIRAN



Pedoman Wawancara Survei Awal Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Di Smk Se-Kota Pekalongan

No	Pertanyaan
1	Menurut bapak/ ibu layanan apakah layanan bimbingan kelompok itu?
2	Dalam layanan bimbingan kelompok ada berapa topik yang dapat dibahas?
3	Apakah layanan bimbingan kelompok sudah tercantum dalam program bimbingan dan konseling di smk ini?
4	Jika layanan bimbingan kelompok pernah atau memang dilaksanakan, bagaimana cara bapak/ ibu dalam merekrut siswa sehingga mereka mau mengikuti layanan bimbingan kelompok?
5	Jika layanan bimbingan kelompok pernah atau memang dilaksanakan, pada waktu apa biasanya layanan bimbingan kelompok dilaksanakan?
6	Apakah dalam menyusun program layanan bimbingan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan siswa asuh?
7	Menurut bapak/ ibu bagaimana tata cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang baik dimulai dari tahap awal sampai akhir?
8	Bagaimana cara bapak/ ibu dalam menyusun jadwal pelaksanaan layanan bimbingan kelompok?
9	Bagaimana cara bapak/ ibu dalam mengevaluasi layanan bimbingan kelompok yang sudah dilaksanakan? Adakah tindak lanjut dari layanan tersebut?

**Kisi-Kisi Instrumen Sebelum Try Out Faktor Determinan
Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	Item	
				+	-
Faktor Determinan Ketidak terlaksanaan bimbingan kelompok	Internal	e. Latarbelakang pendidikan konselor	a. Penyelenggara Bimbingan dan konseling sekolah harus berpendidikan S1 Bimbingan dan Konseling		
		f. Kompetensi kepribadian konselor	a. Beragama, konsisten, dan toleransi terhadap pemeluk agama	1, 2	3
			b. mampu menjadi teladan bagi anggota kelompok dan bersikap demokratis	4, 5	6, 7
			c. berpenampilan menarik dan menyenangkan serta menampilkan tindakan yang cerdas selama kegiatan bimbingan kelompok	8, 10	9, 11
		Kompetensi sosial konselor	a. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat kerja	12, 13	14, 15
			b. Menumbuhkan tenggang rasa antar anggota kelompok	16, 17	18, 19
c. Memiliki hubungan antar personal yang hangat	22, 23		20, 21		
Kompetensi	a. menggunakan	24, 25	26, 27		

		profesional konselor	<p>hasil assesmen dalam pelayanan bimbingan kelompok</p> <p>b. mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan kelompok</p> <p>c. menyusun dan merancang program bimbingan kelompok sesuai dengan volume kegiatan bimbingan kelompok</p> <p>d. melakukan evaluasi proses pelayanan bimbingan kelompok</p>	<p>28, 29, 30</p> <p>31, 32, 33, 32</p> <p>34,36, 38, 40</p> <p>42, 45</p>	<p>35, 37, 39, 41</p> <p>43, 44</p>
	Eksternal	Beban tugas konselor	<p>a. Jumlah siswa yang di bimbing disekolah,</p> <p>b. Tugas tambahan yang diampu selain sebagai konselor sekolah,</p> <p>c. Kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan bimbingan konseling</p>	<p>46</p> <p>48, 50</p> <p>51,52, 55,56, 57, 58</p>	<p>47</p> <p>49</p> <p>53, 54</p>
		Kepala Sekolah	a. memberi kemudahan terlaksananya program bimbingan kelompok	59	60

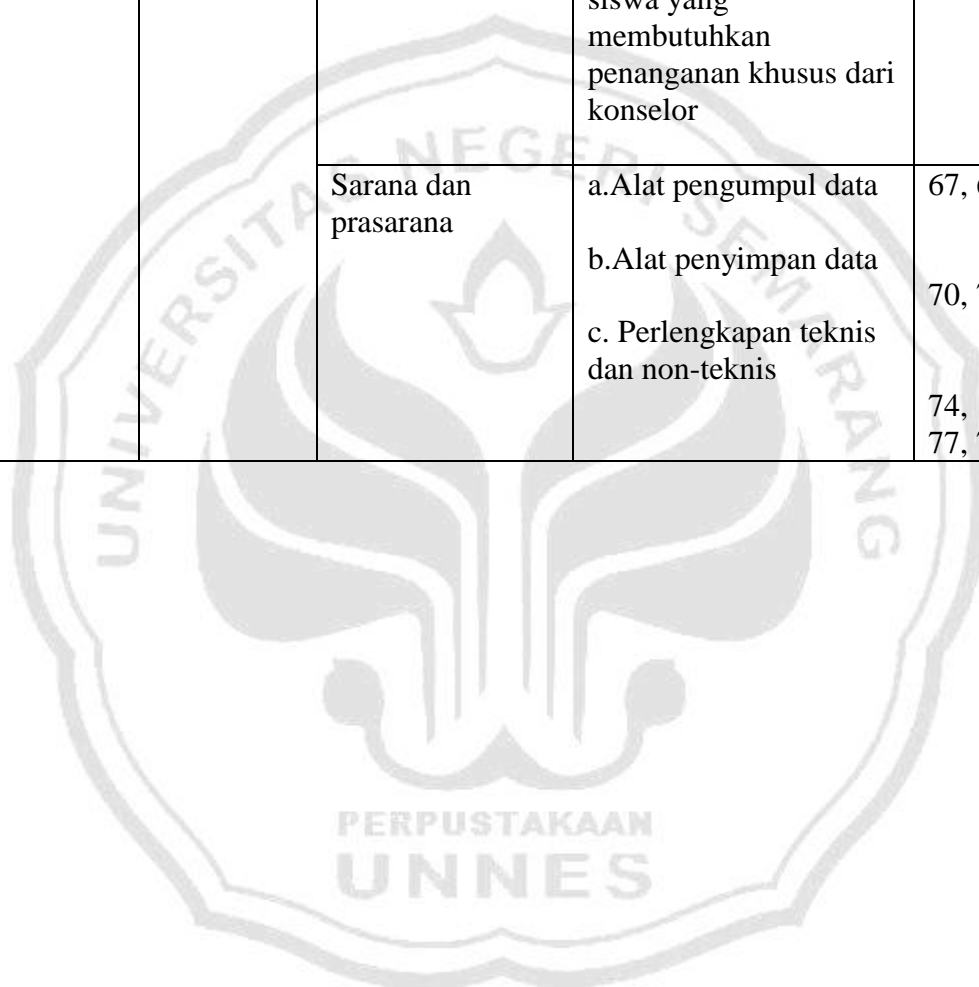
			b. melakukan pengawasan	61	62
			c. menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelayanan bimbingan kelompok	64	63
		Guru mata pelajaran	a. memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan kelompok	65, 67	66, 68
			b. memberi motivasi kepada siswa untuk mengikuti bimbingan kelompok	69	70
		Wali Kelas	a. memberi informasi kepada siswa tentang layanan bimbingan kelompok	71, 73, 74	72
			b. mengirimkan referal siswa yang membutuhkan penanganan khusus dari konselor	77	75, 76
		Sarana dan prasarana	a. Alat pengumpul data	79 80	78, 81
			b. Alat penyimpan data	82, 84	83, 85
			c. Perlengkapan teknis dan non-teknis	86, 88, 89, 90, 92, 93	87, 91

**Kisi-Kisi Instrumen Sesudah Try Out Faktor Determinan
Ketidakterlaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	Item	
				+	-
Faktor Determinan Ketidak terlaksanaan bimbingan kelompok	Internal	Latarbelakang pendidikan konselor	a. Penyelenggara Bimbingan dan konseling sekolah harus berpendidikan S1 Bimbingan dan Konseling		
		Kompetensi kepribadian konselor	a. Beragama, konsisten, dan toleransi terhadap pemeluk agama	1, 2	3
			b. mampu menjadi teladan bagi anggota kelompok dan bersikap demokratis	4, 5	6, 7
			c. berpenampilan menarik dan menyenangkan serta menampilkan tindakan yang cerdas selama kegiatan bimbingan kelompok	8, 10	9, 11
		Kompetensi sosial konselor	a. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat kerja	12,	13, 14
b. Menumbuhkan tenggang rasa antar anggota kelompok	15, 16		17, 18		
c. Memiliki hubungan antar personal yang hangat	20		19		
Kompetensi profesional konselor	a. menggunakan hasil assesmen dalam pelayanan bimbingan kelompok	21, 22	23		
	b. mengaplikasikan dalam praktik format	24, 25	26, 27, 28		

			<p>elayanan bimbingan kelompok</p> <p>c. menyusun dan merancang program bimbingan kelompok sesuai dengan volume kegiatan bimbingan kelompok</p> <p>d. melakukan evaluasi proses pelayanan bimbingan kelompok</p>	<p>29, 32,</p> <p>35, 36</p>	<p>30, 31, 33, 34</p> <p>37, 38</p>
	Eksternal	Beban tugas konselor	<p>a. Jumlah siswa yang di bimbing disekolah,</p> <p>b. Tugas tambahan yang diampu selain sebagai konselor sekolah,</p> <p>c. Kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan bimbingan konseling</p>	<p>39</p> <p>41, 43</p> <p>44, 48, 49</p>	<p>40</p> <p>42</p> <p>45, 46</p>
		Kepala Sekolah	<p>a. memberi kemudahan terlaksananya program bimbingan kelompok</p> <p>b. melakukan pengawasan</p> <p>c. menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelayanan bimbingan kelompok</p>	<p>50</p> <p>52</p> <p>55</p>	<p>51</p> <p>53</p> <p>54</p>
		Guru mata pelajaran	<p>a. memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan kelompok</p> <p>b. memberi motivasi kepada siswa untuk</p>	<p>56</p> <p>59</p>	<p>57, 58</p> <p>60</p>

			mengikuti bimbingan kelompok		
	Wali Kelas	a. memberi informasi kepada siswa tentang layanan bimbingan kelompok	61, 62	63	
		b. mengirimkan referral siswa yang membutuhkan penanganan khusus dari konselor	66	64, 65	
	Sarana dan prasarana	a. Alat pengumpul data	67, 68	69	
		b. Alat penyimpan data	70, 72	71, 73	
		c. Perlengkapan teknis dan non-teknis	74, 76, 77, 79	75, 78	



Daftar Latar Belakang Pendidikan Konselor Di SMK Se Kota Pekalongan

No	Nama	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Universitas
1	M	S1	BK	IKIP Veteran Semarang
2	R	S1	BK	IKIP Negeri Semarang
3	TA	D3	Teknik Elektro	IKIP PGRI Semarang
4	K	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
5	M	S1	PJKR	Universitas Negeri Semarang
6	AZ	S1	PJKR	Universitas Negeri Semarang
7	AK	S1	Syariah Islam	Institut Agama Islam Tribakti Kediri
8	R	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
9	A	S1	Pendidikan Agama Islam	IAIN Walisongo Semarang
10	C	S1	Pendidikan Bahasa Arab	IAIN Walisongo Semarang
11	J	S1	BK	IKIP Negeri Semarang
12	M	D3	Akuntansi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
13	LW	S1	BK	IKIP Negeri Semarang
14	HF	S1	BK	Universitas Pancasakti Tegal
15	EY	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
16	IMP	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
17	S	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
18	AR	S1	BK	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
19	LN	S1	BK	IKIP Veteran Semarang
20	AS	S1	Psikologi	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
21	SS	S1	BK	Universitas Negeri Semarang
22	SA	S1	BK	IKIP Negeri Semarang
23	NBA	S1	Teknologi Pendidikan	Universitas Negeri Semarang
24	K	S1	BK	IKIP Negeri Semarang
25	MS	S1	BK	Universitas Negeri Semarang
26	RW	S1	Pendidikan Kimia	Universitas Negeri Semarang
27	AM	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
28	T	S1	BK	IKIP Veteran Semarang

29	IS	S1	Psikologi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
30	R	S1	Bahasa Indonesia	Universitas Negeri Semarang

